

**PERAN AMNESTY INTERNATIONAL TERHADAP KEBIJAKAN WAR  
ON DRUGS DI FILIPINA PADA ERA RODRIGO DUTERTE TAHUN  
2019-2022**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FADHIL DJAELANI**

19323202

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**RESPONS AMNESTY INTERNATIONAL TERHADAP KEBIJAKAN  
WAR ON DRUGS DI FILIPINA PADA ERA RODRIGO DUTERTE  
TAHUN 2019-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**FADHIL DJAELANI**

19323202

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN AMNESTY INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN WAR ON  
DRUGS RODRIGO DUTERTE DI FILIPINA PADA TAHUN 2019-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan  
Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat  
Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
20 Desember 2023

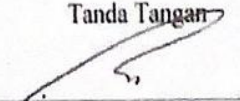
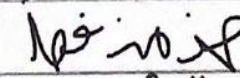
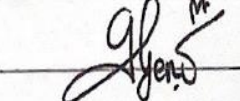
Mengesahkan  
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
3. Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, sertakutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur Universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*20 Desember 2023*



---

**Fadhil Djaelani**

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>7</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>9</b>
<b>1.7 Argumen Sementara</b> .....	<b>13</b>
<b>1.8 Metode Penelitian</b> .....	<b>13</b>
1.8.1 Jenis Penelitian .....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB 2 KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DUTERTE TAHUN 2019-2020</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1 Permasalahan Narkoba di Filipina</b> .....	<b>16</b>
<b>2.2 Respons Duterte terhadap Permasalahan Narkoba di Filipina</b> .....	<b>17</b>
<b>2.3 Dampak Kebijakan War On Drugs Duterte</b> .....	<b>20</b>
<b>2.4 Respons Masyarakat Filipina dan Internasional terhadap Dampak Kebijakan War On Drugs Filipina</b> .....	<b>24</b>
<b>2.5 Gambaran Umum Amnesty Internasional</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB 3 PERAN AMNESTY INTERNATIONAL DALAM MERESPONS KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DI FILIPINA</b> .....	<b>36</b>
<b>3.1 Advokasi dan Lobi</b> .....	<b>36</b>
<b>3.2 Meningkatkan Kesadaran melalui Edukasi</b> .....	<b>49</b>
<b>3.3 Menyusun Agenda Kebijakan (Agenda Setting)</b> .....	<b>51</b>
<b>3.4 Mengawasi Aktor Transnasional Lainnya</b> .....	<b>53</b>

<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>54</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>54</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>

## ABSTRAK

Permasalahan penggunaan narkoba dan obat-obatan ilegal lainnya merupakan salah satu isu penting dalam lingkup domestik Filipina. Tingginya tingkat penggunaan narkoba mendorong Presiden Rodrigo Duterte untuk mengimplementasikan kebijakan *war on drugs*, dengan salah satu program utamanya adalah pembunuhan tanpa proses hukum atau *extrajudicial killings*. Kebijakan itu memicu protes dari berbagai pihak karena pelanggaran terhadap HAM yang terus-menerus terjadi di Filipina dengan mengatasnamakan kebijakan *war on drugs*. Salah satu pihak yang menentang kebijakan tersebut adalah Amnesty International. Penelitian selanjutnya bertujuan untuk menjelaskan peran Amnesty International dalam merespon kebijakan *war on drugs* Duterte pada tahun 2019-2022. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan konsep organisasi non-pemerintah (NGO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggapi isu pelanggaran HAM dalam kebijakan *war on drugs*, Amnesty International melakukan empat cara, yaitu advokasi dan lobi melalui pemberian informasi, meningkatkan pengaruh terhadap aktor eksternal, dan melobi pemerintah Filipina; memberikan edukasi; menyusun agenda kebijakan; serta mengawasi aktivitas aktor transnasional lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah Filipina untuk mengatasi isu pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya.

**Kata kunci:** Amnesty International, Filipina, Rodrigo Duterte, *war on drugs*, organisasi non-pemerintah (NGO)

## ABSTRACT

The problem of the use of narcotics and other illegal drugs is an important issue within the domestic scope of the Philippines. The high level of narcotics use prompted President Rodrigo Duterte to implement a war on drugs policy, with one of the main programs being extrajudicial killings. This policy sparked protests from various parties because of the violations of human rights that continuously occur in the Philippines in the name of the war on drugs policy. One of the parties opposing this policy is Amnesty International. The next research aims to explain the role of Amnesty International in responding to Duterte's war on drugs policy in 2019-2022. To answer research questions, the author uses the concept of non-governmental organizations (NGOs). The research results show that in responding to the issue of human rights violations in the war on drugs policy, Amnesty International carried out four methods, namely advocacy and lobbying through providing information, increasing influence on external actors, and lobbying the Philippine government; provide education; setting the policy agenda; as well as monitoring the activities of other transnational actors. It is hoped that these activities will encourage the Philippine government to address the issue of human rights violations that occur in the country.

**Keywords:** Amnesty International, The Philippines, Rodrigo Duterte, *war on drugs*, non-governmental organization (NGO)





# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Narkotika dan obat-obatan ilegal menjadi salah satu isu yang meresahkan berbagai negara di dunia. Salah satu negara yang menaruh perhatian khusus terhadap isu narkotika adalah Filipina. Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dengan narkotika. Hal ini karena Filipina sendiri sudah mengenal opium, salah satu jenis narkotika, sejak ratusan tahun yang lalu. Penggunaan opium sendiri sudah dimanfaatkan oleh masyarakat suku Moro di Mindanao, Filipina, sejak 1521. Pada abad ke-17 sendiri, penggunaan opium di Filipina sudah bertujuan untuk hiburan yang memabukkan. Selain itu, opium juga digunakan sebagai penghilang kesadaran agar tidak memberikan informasi kepada musuh (Sarlina 2018).

Seiring berjalannya waktu, penyalahgunaan opium maupun obat-obatan ilegal lainnya masih marak terjadi di Filipina. Di tahun 1930-an sendiri, pecandu narkotika di Filipina mulai mengonsumsi kokain, ganja, heroin, hingga morfin, yang diimpor dari Swiss dan Jerman. Pasca Perang Dunia ke-2, peredaran narkotika di Filipina semakin masif dan mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun rezim Ferdinand Marcos mengeluarkan dekrit presiden untuk menghukum berat pengguna obat-obatan ilegal, disusul dengan berbagai peraturan lainnya, tetapi penggunaannya masih marak dan semakin meluas (Jesus, et al. 2012). Kondisi ini diperparah dengan masuknya shabu di tahun 1990-an yang menjadi populer di tengah masyarakat Filipina. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan ilegal membuat jumlah penggunaannya meningkat hingga hampir 100 kali lipat di tahun

2003, dari yang sebelumnya hanya 200 ribu pengguna di tahun 1972 (Porio dan Crisol 2004).

Berdasarkan Dangerous Drugs Board (DDB), yaitu badan pemerintah Filipina yang bertugas untuk menangani permasalahan obat-obatan ilegal, terdapat setidaknya 1,8 juta pengguna narkotika di Filipina (Gavilan 2016), dengan jenis obat-obatan yang paling banyak digunakan adalah metamfetamin atau shabu. Laporan PBB tahun 2012 menyatakan bahwa Filipina merupakan negara dengan konsumsi shabu tertinggi di Asia Timur, dimana sebanyak 2,2% penduduk Filipina berusia 16-64 tahun merupakan pengguna shabu (Simbulan, et al. 2019). Bahkan, dalam lingkup pemerintahan pun, diperkirakan sebanyak satu perlima dari *barangay*—divisi administrasi terkecil dalam pemerintahan di Filipina—terlibat dalam produksi, distribusi, ataupun konsumsi obat-obatan terlarang. Di Manila, 92% *barangay* diketahui terlibat dalam tindak jual-beli narkotika (Xu 2016).

Sejak awal pemerintahannya pada tahun 2016, Presiden Duterte mengeluarkan kebijakan untuk melawan peredaran dan penggunaan narkotika, yang selanjutnya disebut sebagai kebijakan *war on drugs*. Kebijakan itu sesuai dengan kampanye presidensial Duterte yang sebelumnya menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan permasalahan obat-obatan terlarang di negara tersebut yang menurut Duterte selama ini berkontribusi pada kegagalan masyarakat muda di Filipina. Di samping itu, kebijakan *war on drugs* juga merupakan lanjutan dari kebijakan yang ia implementasikan selama menjabat sebagai walikota Kota Davao. Dengan terpilihnya Duterte sebagai presiden, kebijakan *war on drugs* pun mulai diimplementasikan dalam tingkat nasional (Xu 2016).

Namun, implementasi kebijakan *war on drugs* di Filipina justru memberikan dampak negatif pada keamanan masyarakat. Permasalahan obat-obatan terlarang di Filipina sejak awal dipandang sebagai permasalahan kriminal sehingga dalam upaya menangani permasalahan tersebut, implementasi kebijakan dalam bentuk kriminalisasi dan pemberian hukuman pun dilakukan (Simbulan, et al. 2019). Pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan Philippine National Police (PNP) yang diperintahkan oleh Duterte untuk menembak mati pengedar obat-obatan terlarang dan menjanjikan imbalan yang besar jika aparat berhasil menangkap pengedar dan pengguna narkotika (Guay and Cawi 2021, 192). Akibatnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pun meningkat dengan pesat di Filipina dan menjadi perhatian masyarakat internasional.

Dalam enam bulan pertama pelaksanaan kebijakan *war on drugs* di Filipina, atau pada Juli 2016 hingga Januari 2017, PNP telah melakukan lebih dari 43.000 operasi yang berdampak pada ditangkapnya 53.025 orang yang dicurigai terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang di Filipina (Rappler, IN NUMBERS: The Philippines' 'war on drugs' 2016). Dari jumlah tersebut, pemerintah menyatakan sebanyak lebih dari 7.000 orang tewas, baik karena hukuman mati ataupun dalam proses penangkapan yang melibatkan baku tembak (Simbulan, et al. 2019). Hingga September 2018, jumlah korban tewas akibat penerapan *war on drugs* mencapai hampir 23.000 orang, dimana sebagian besar di antaranya merupakan korban penembakan yang tidak teridentifikasi (Roth 2019). Angka sesungguhnya dapat jauh lebih besar karena pemerintah Filipina menolak untuk memberikan data resmi terkait pelaksanaan *war on drugs*.

Lebih buruknya, aksi pembunuhan terhadap tersangka pelaku pengedaran narkotika tidak hanya dilakukan oleh PNP, tetapi juga oleh masyarakat umum. Selain karena imbalan yang besar, mereka yang memutuskan untuk ikut menangkap tersangka pengedaran narkotika juga takut menjadi target pembunuhan jika tidak mendukung kebijakan Duterte. Bahkan, tidak jarang pembunuhan dilakukan secara acak hanya untuk menghindari kecurigaan pemerintah, tanpa terkecuali terhadap anak-anak (Al Jazeera 2017). Dalam satu tahun setelah kebijakan *war on drugs* mulai diterapkan di Filipina, aparat penegak hukum tidak hanya menargetkan tersangka pengedar obat-obatan terlarang, tetapi mereka juga melakukan penembakan terhadap aktivis HAM yang memberikan kritik bagi kebijakan Duterte (Simbulan, et al. 2019).

Implementasi kebijakan *war on drugs* oleh Duterte juga didukung oleh sistem hukum yang lambat dan dinilai korup, sehingga pelanggaran HAM yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan tersebut cenderung diabaikan di Filipina. Terlebih, pengedar ataupun pengguna narkoba memiliki stigma buruk di mata masyarakat, yang selanjutnya membuat mereka sulit untuk mendapatkan simpati ketika terjadi pembunuhan dengan dalih penegakan hukum seperti yang terjadi di Filipina. Kondisi tersebut diimbangi dengan performa Duterte yang baik di bidang lain, khususnya ekonomi. Survei yang dilakukan oleh Pulse Asia Research pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Duterte mencapai 86% (Xu 2016). Dengan demikian, publik Filipina pun cenderung tidak memandang kebijakan *war on drugs* sebagai aspek yang negatif.

Akan tetapi, pelanggaran HAM yang dilakukan terus-menerus pada kebijakan *war on drugs* Duterte mendorong respon negatif dari aktor internasional,

salah satunya adalah Amnesty International. Amnesty International merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang penegakan HAM dan dibentuk pada tahun 1961. Amnesty International menjadi salah satu organisasi yang paling vokal dalam menyuarakan penolakannya atas pelanggaran HAM yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan *war on drugs* yang diterapkan oleh Duterte. Sebagai contoh, pada Februari 2017, Amnesty International menerbitkan laporan investigasi yang menyatakan bahwa pemerintah dan kepolisian Filipina berperan sebagai kriminal yang membunuh orang miskin yang dicurigai sebagai pengedar narkoba dan mencuri barang-barang milik korban. Laporan tersebut pun menjadi acuan bagi aktivitas-aktivitas selanjutnya yang dilakukan oleh Amnesty International dalam menentang implementasi kebijakan *war on drugs* Duterte.

Duterte pun semakin mendapatkan banyak tekanan internasional, salah satunya dari International Criminal Court (ICC). ICC menyatakan akan menginvestigasi kasus pembunuhan tanpa proses hukum yang terjadi di Filipina sebagai respons atas gugatan dari keluarga korban pembunuhan. Akan tetapi, pemerintah menolak pelaksanaan investigasi ICC yang dinilai tidak menghormati hukum domestik Filipina. Bahkan, Duterte menyatakan akan menangkap Fatou Bensouda, Jaksa ICC, jika ia memaksa untuk tetap melaksanakan investigasi (Mogato and Petty 2018). Pada tahun 2018, Duterte menyatakan akan menarik diri dari ICC karena keputusan investigasi tersebut. Filipina pun resmi keluar dari ICC sejak Maret 2019 (ICC 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa sejak menjabat sebagai presiden pada tahun 2016, Duterte menerapkan kebijakan anti-narkoba yang dinilai melanggar HAM karena penggunaan kekerasan, bahkan pembunuhan

terhadap tersangka pelaku tindak kriminal narkoba. Kebijakan *war on drugs* yang dijalankan sejak tahun 2016 tersebut memicu respons negatif dari banyak aktor, yang selanjutnya mendorong dilakukannya investigasi terhadap pemerintah Filipina. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2019, Filipina secara resmi keluar dari ICC sehingga keputusan ICC tidak lagi mengikat terhadap Filipina.

Dalam hal ini, Amnesty International sebagai organisasi yang bergerak di bidang HAM juga melakukan berbagai upaya untuk menangani dan meminimalisir kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina. Hal tersebut karena keluarnya Duterte dari ICC pada tahun 2019 menunjukkan bahwa organisasi internasional pun tidak mampu untuk menekan Duterte agar kembali menerapkan norma-norma yang *seharusnya*. Oleh karena itu, penulis selanjutnya meneliti bagaimana peran Amnesty International terhadap kebijakan *war on drugs* di Filipina pada masa pemerintahan Duterte tahun 2019-2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ditetapkan rumusan masalah yakni “Bagaimana respons Amnesty International terhadap kebijakan *war on drugs* di Filipina pada era Rodrigo Duterte tahun 2019-2022?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang dijabarkan sebagai berikut.

Menjelaskan respons Amnesty International terhadap kebijakan *war on drugs* di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Duterte tahun 2019-2022.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini menitikberatkan pada penjelasan terkait respons Amnesty International terhadap kebijakan *war on drugs* di Filipina pada tahun 2019-2022. Dalam lingkup waktu, penelitian dilakukan dengan memfokuskan pada implementasi kebijakan oleh Presiden Duterte pada tahun 2019-2022. Pemilihan tahun 2019 dilakukan karena pada tahun tersebut, Duterte memutuskan untuk menarik Filipina dari Mahkamah Pidana Internasional pasca mengalami kecaman sehingga menunjukkan keinginan Duterte untuk terus melanjutkan kebijakan *war on drugs* walaupun menghadapi penolakan dari berbagai pihak. Selanjutnya, dapat dilihat apakah Amnesty International memberikan respons khusus atas Filipina. Di sisi lain, tahun 2022 dipilih menjadi jangkauan penelitian akhir karena pada tahun tersebut, masa pemerintahan Duterte di Filipina berakhir.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Penelitian pertama ditulis oleh Hendra Maujana Saragih, Anisa Prayuningsih (2021) yang berjudul Kebijakan War On Drug Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina. Penelitian tersebut membahas survei yang dimana masyarakat Filipina mulai sadar akan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Duterte yang dimana kebijakan untuk memerangi peredaran narkoba tersebut tidak dapat memberantas semua kartel narkoba di Filipina. Akan tetapi masyarakat Filipina juga menyadari bahwa kebijakan *War*

*On Drugs* yang dilakukan Duterte bukan untuk memerangi orang miskin, akan tetapi memerangi kartel narkoba.

Penelitian kedua ditulis oleh Salasmita, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty (2022) yang berjudul *Extrajudicial Killing* dalam Kebijakan *War on Drugs* di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional. Penelitian tersebut membahas hukum terkait kebijakan Presiden Duterte dalam menangani kasus narkoba di Filipina yang dimana hal tersebut merupakan salah satu kejahatan internasional. Pada penelitian ini penulis akan menelaah karakteristik dari setiap kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat yang diakui oleh hukum internasional yaitu *Genocide*, *Crime Against Humanity* dan *War Crimes*.

Penelitian ketiga ditulis oleh Veniati Sarlina (2018) yang berjudul Respon Amnesty Internasional Terhadap Pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (NARKOBA) di Filipina pada Masa Rodrigo Duterte. Penelitian tersebut membahas tentang respon *Amnesty Internasional* yang menganggap bahwa Duterte mengesampingkan HAM di Filipina. Warga sipil di Filipina yang tidak terkena kasus narkoba pun ikut merasakan akibat dari kebijakan *War On Drugs* tersebut yang dimana pemberantasan narkoba di Filipina tidak melalui peradilan yang seharusnya, *Amnesty International* juga ingin mengembalikan nilai-nilai HAM di Filipina yang dianggap sudah hilang semenjak kebijakan Duterte tersebut.

Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian penulis dengan ketiga penelitian di atas, yakni pembahasan tentang kebijakan *war on drugs* di Filipina yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Duterte. Bahkan, penelitian



Sarlina juga membahas tentang peran Amnesty International dalam mengatasi permasalahan HAM yang muncul sebagai akibat dari kebijakan *war on drugs*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Sarlina terletak pada cakupan waktu penelitian, yang mana Sarlina menjelaskan peran Amnesty International sebelum tahun 2018, sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap peran Amnesty International tahun 2019-2022. Selain itu, dua penelitian lainnya hanya membahas tentang gambaran dari kebijakan *war on drugs* itu sendiri, tetapi tidak terfokus pada upaya penyelesaian pelanggaran HAM dalam kebijakan tersebut, khususnya yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Sepanjang abad 20, NGO pada umumnya identik dengan kegiatan amal dan bantuan. NGO merupakan kelompok misionaris Kristen di Eropa yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pada tahun 1970-an, NGO terlibat dalam mengambil keputusan, memberi bantuan pembangunan yang resmi serta kritikus dan pengawas. (Ahmed and Potter 2006).

NGO mencakup peran-peran utama dalam hubungan internasional yang terdiri dari bantuan, pembangunan sosial dan ekonomi serta peran politik.

### **a. Relief**

Pada tahun 1970-an NGO membuat beberapa organisasi amal dan komunitas yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan masyarakat, memastikan keadilan serta mengadvokasi kepentingan untuk masyarakat.

Pada akhir abad 19, NGO mengeluarkan rangsangan moral terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Hal tersebut merupakan bantuan pribadi untuk menyelamatkan penyakit yang diakibatkan oleh kelaparan. Fokus utama NGO pada saat ini adalah bantuan dan amal. NGO membentuk organisasi *Medecins Sans Frontieres* yang didedikasikan untuk menolong manusia yang terkena bencana alam. Pada abad terakhir, tugas-tugas NGO tersebut semakin relevan dengan kondisi dunia pada saat ini.

b. Peran Sosial dan Pengembangan

NGO menyadari bahwa upaya pemberian bantuan dan amal hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek akan tetapi tidak memberikan dampak apapun terhadap permasalahan jangka panjang. NGO juga mempertimbangkan cara-cara untuk mendukung ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang tentang permasalahan jangka panjang mengenai ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Karena itu, NGO menjalankan program pengembangan seperti mendirikan koperasi petani, memerangi deforestasi dan sistem irigasi. Program lainnya adalah pinjaman untuk usaha kecil yang sedang merintis dan mempromosikan teknologi.

c. Peran Politik

Pertolongan terkait pembangunan dianggap non-politis oleh pemerintah dan masyarakat. Semakin banyak NGO yang memiliki tujuan pembangunan dalam konteks politik dibandingkan ekonomi. Akan tetapi pada saat ini banyak NGO yang terlibat dalam kegiatan seperti advokasi,

lobi dan pembentukan agenda yang bertujuan mempengaruhi kebijakan negara-negara tersebut. Menurut Shamima Ahmed dan David Potter, terdapat beberapa variabel yaitu *advocacy and lobbying, public education and consciousness raising, agenda setting, monitoring other transnational actors, agenda setting in the global decision-making arena*. Pada tulisan ini peneliti membedah peranan politik amnesty internasional menggunakan variabel *advocacy and lobbying*.

Advokasi merupakan peran penting NGO di tingkat internasional. Advokasi menangkap keunikan dari mereka yang diorganisir untuk mempromosikan tujuan, ide-ide dan norma-norma yang berprinsip, dan sering kali melibatkan individu-individu yang menganjurkan perubahan kebijakan yang tidak dapat dihubungkan dengan mudah pada pemahaman rasionalis tentang “kepentingan” mereka. Lobi merupakan kegiatan yang sudah umum bagi NGO. NGO sudah tidak asing terkait hal tersebut karena NGO sering melobi pemerintahan mereka, pemerintahan lain serta kekuatan lain organisasi internasional.

Pada penelitian ini, peran Amnesty International dalam merespons kebijakan *war on drugs* Duterte dilihat melalui tiga poin, yakni advokasi dan lobi, edukasi dan meningkatkan kesadaran publik, menyusun politik agenda. Namun, pembahasan akan ditekankan pada peran Amnesty International sebagai jaringan advokasi dan lobi transnasional.

- *Advocacy and lobbying*

Advokasi menjadi salah satu peran utama organisasi non-pemerintah dalam hubungan internasional, karena organisasi tersebut menjalankan fungsi sebagai

jaringan advokasi transnasional. dalam upaya mempengaruhi politik internasional, jaringan advokasi terlibat dalam tiga bentuk politik, yaitu (1) politik informasi, yang mana jaringan menyediakan dan meinterpretasikan kembali informasi terkait isu tertentu; (2) politik pengaruh, yang mana jaringan berupaya untuk mendapatkan pengaruh dari aktor yang lebih kuat, seperti negara dan organisasi internasional; serta (3) politik akuntabilitas, yang mana jaringan mendorong negara untuk mengikuti norma dan prinsip yang sebelumnya telah mereka setuju. (Ahmed and Potter 2006) Sedangkan lobi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung advokasi.

- *Public education and consciousness raising*

Edukasi dan peningkatan kesadaran publik merupakan hal penting dalam aktivitas NGO yang bertujuan untuk mencapai implikasi politik. Hal tersebut karena opini publik merupakan hal penting dalam advokasi NGO sehingga sosialisasi politik pun menjadi salah satu inti dalam aktivitas NGO. Terlebih bagi NGO yang bergerak di bidang HAM, seperti Amnesty International, publisitas dapat berpengaruh signifikan bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Publisitas dilakukan dengan cara menempatkan isu HAM dalam agenda politik internasional (Ahmed and Potter 2006).

- *Agenda setting*

Melalui edukasi publik, serta aktivitas advokasi dan lobi, NGO berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan agenda kebijakan. Penyusunan agenda dapat dilihat dari upaya NGO untuk menempatkan isu tertentu dalam agenda politik sehingga pejabat pembuat kebijakan dapat memberi perhatian lebih pada isu tersebut. Pada isu HAM, hal ini menjadi penting karena

umumnya pemerintah cenderung mengabaikan isu-isu terkait hak perempuan dan hak individu, sehingga sebagian besar isu HAM yang menjadi agenda politik dimulai dari agenda NGO (Ahmed and Potter 2006, 49).

## **1.7 Argumen Sementara**

Berdasarkan penelitian awal, respons Amnesty International terhadap kebijakan *war on drugs* di Filipina dapat dilihat melalui beberapa bentuk. Pertama, Amnesty International berupaya untuk mempengaruhi pemerintah Filipina dengan cara menyuarakan penolakannya secara langsung pada pemerintah terkait kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan *war on drugs*. Di samping itu, Amnesty International juga membuat kampanye dan melakukan demonstrasi secara langsung untuk meminta dukungan masyarakat. Kedua, Amnesty International juga meminta bantuan pada organisasi internasional, seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional. Ketiga, Amnesty International bekerja sama dengan NGO-NGO lainnya yang berada pada bidang yang sama. Untuk sementara, penulis belum menemukan partisipasi Amnesty International dalam mempengaruhi aktor swasta terkait pelanggaran yang terjadi akibat implementasi kebijakan *war on drugs* di Filipina pada masa pemerintahan Duterte.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan kata-kata, bukan angka, dari sudut pandang subyek penelitian (Moleong 2008).

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subyek penelitian ini adalah Amnesty International dan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan *war on drugs* di Filipina. Sedangkan obyek penelitian ini adalah respons Amnesty International terhadap kebijakan *war on drugs* yang diimplementasikan oleh Duterte pada tahun 2019-2022.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dalam penelitian, digunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui sumber yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan lain-lain yang terjamin kredibilitasnya.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Pengumpulan data-data yang relevan merupakan proses pertama dalam penelitian ini. Tahap ini dilakukan dengan studi pustaka. Selanjutnya, data akan dipilah dan direduksi, kemudian diolah, sehingga penelitian dapat tetap terfokus pada batasan dan jangkauan tertentu. Pada akhirnya, verifikasi dan penarikan kesimpulan pun dilakukan untuk menunjukkan hasil penelitian.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari empat bab, yang pertama adalah

**Bab 1** yang berisi latar belakang pelaksanaan penelitian, rumusan masalah, tujuan serta cakupan penelitian, tinjauan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, kerangka pemikiran untuk menganalisis rumusan masalah, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dari penelitian ini.

**Bab 2** berisi tentang histori kasus narkoba di Filipina, implementasi

kebijakan *war on drugs* dan pelanggaran yang menyertainya

**Bab 3** menjelaskan tentang respons Amnesty Internasional terhadap kebijakan *war on drugs* di Filipina tahun 2019-2022 beserta analisis menggunakan konsep NGO.

**Bab 4** dijelaskan tentang kesimpulan dan saran bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

## BAB 2

### KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DUTERTE TAHUN 2019-2020

#### 2.1 Permasalahan Narkoba di Filipina

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan konsumsi obat-obatan terbesar di dunia, khususnya bagi pasar metamfetamin atau shabu, yang mana sepertiga dari penggunaan narkoba berasal dari kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, Indonesia, Thailand, dan Filipina menjadi negara dengan penggunaan narkoba jenis shabu terbanyak di Asia Tenggara. UN Office on Drugs and Crime (UNODC) menyatakan bahwa 1,1% dari populasi Filipina, atau sebanyak 850.000 orang, merupakan pengguna aktif shabu (UNODC, Drug Use and Health Consequences 2020, 21). Angka tersebut belum menunjukkan jumlah pengguna narkoba jenis lainnya, misalnya kokain, dengan jumlah pengguna di Filipina mencapai 0,1% dari populasi (UNODC 2012). Statistik tersebut menunjukkan bahwa Filipina memiliki kasus penyalahgunaan obat-obatan yang cukup besar.

PDEA (Philippine Drug Enforcement Agency) menyebutkan bahwa sebanyak 20,51% atau 8.629 desa dari 42.065 *barangay* menghadapi kasus penyalahgunaan narkoba di Filipina, mulai dari petani, pengolah, hingga pengguna. Metro Manila merupakan wilayah dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbesar, dengan porsi 92,1% *barangay* yang terdampak oleh narkoba, disusul oleh Southern Tagalog dengan 33,78% (Carcamo 2015). Pemerintahan Duterte sendiri menyebut bahwa terdapat 3-4 juta pengguna narkoba di Filipina, yang mana 932.000 orang di antaranya telah menyerahkan diri. Namun, Dangerous Drugs Board (DDB) menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di Filipina adalah 1,8 juta orang,



sedangkan sebanyak 4,8 juta orang di Filipina setidaknya telah menggunakan narkoba satu kali (Rappler, Duterte's war on drugs: The first 6 months 2016).

## **2.2 Respons Duterte terhadap Permasalahan Narkoba di Filipina**

Terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina pada tahun 2016 menandai awal perubahan kebijakan narkoba di negara tersebut. Sebelumnya, salah satu fokus dalam kampanye presidensial Duterte adalah untuk mengatasi permasalahan narkoba di Filipina karena pengedaran dan ketergantungan narkoba merupakan permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial negara tersebut. Duterte menyatakan komitmennya untuk menerapkan kebijakan anti narkoba skala besar yang tegas, sama halnya dengan kebijakan yang ia terapkan saat ia menjabat sebagai Walikota Davao (Xu 2016). Bahkan, Duterte menyatakan bahwa lebih dari 100.000 orang (pelaku tindak kriminal terkait narkoba) akan tewas karena kebijakan tersebut, menunjukkan keseriusannya dalam upaya pemberantasan kasus narkoba di Filipina (Morgan and Groom 2016).

Sejak resmi memasuki pemerintahan pada 30 Juni 2016, Duterte segera mengimplementasikan kebijakan *war on drugs*-nya yang dinilai ekstrem karena ia menyatakan akan membunuh pelaku kriminal dalam jumlah besar, khususnya adalah pengedar narkoba. Dalam kampanye anti narkobanya, Duterte mendorong masyarakat untuk membunuh pihak-pihak yang diketahui sebagai pengguna ataupun pengedar narkoba. Hal tersebut dijelaskan dalam pernyataannya, yaitu *“If you know of any addicts, go ahead and kill them yourself as getting their parents to do it would be too painful”* (Worley 2016). Pernyataan Duterte tersebut diterjemahkan sebagai dukungan terhadap *extrajudicial killing* atau pembunuhan di

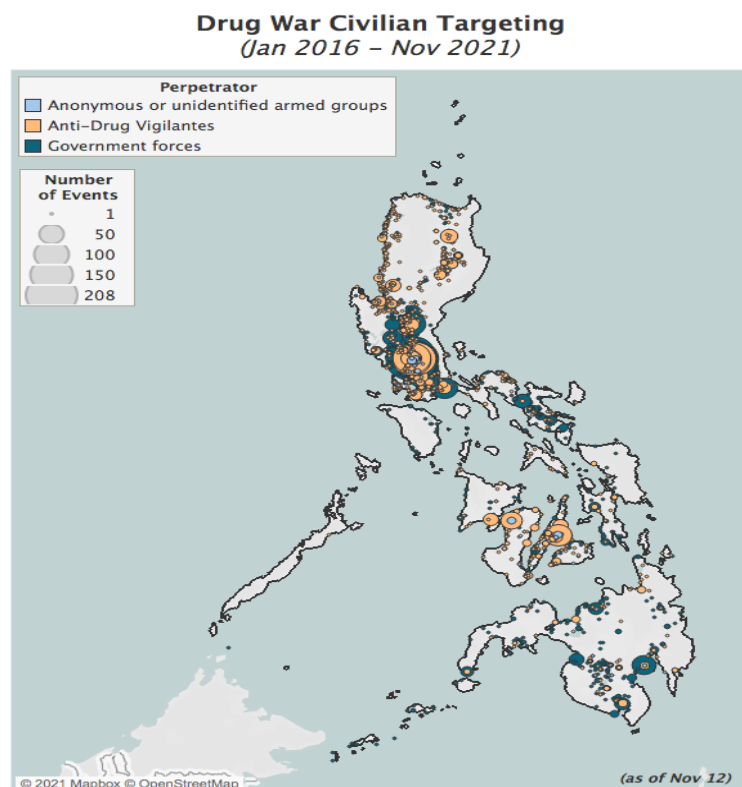
luar proses hukum, yang selanjutnya meningkatkan jumlah kasus pembunuhan acak di Filipina.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Duterte memobilisasi Kepolisian Filipina (*Phillipine National Police*, PNP) dan pemerintah daerah di seluruh wilayah dengan tujuan untuk pelaksanaan operasi penggerebakan dari pintu-ke-pintu (Simbulan, et al. 2019, 1). Dalam hal ini, Duterte menjanjikan pemberian imbalan tunai dan promosi jabatan bagi aparat yang berhasil membunuh tersangka narkoba (Conde, *Philippine Police Promotions an Affront to 'Drug War' Victims* 2018). Salah satu pejabat yang mendukung kebijakan Duterte dan berhasil mendapatkan posisi kuat dalam pemerintahan adalah Ronald dela Rosa, yang sebelumnya merupakan Kepala PNP dan selanjutnya berhasil menjadi anggota senat pada tahun 2019 atas dukungan Duterte (Esguerra 2019). Duterte menyatakan bahwa ia akan melindungi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap pengedar ataupun pengguna narkoba. Lebih lanjut, Duterte menyatakan akan memberikan pengampunan hukum bagi mereka yang terdakwa bersalah ketika mengimplementasikan kebijakan *war on drugs* (Worley 2016).

Tidak hanya aparat, Duterte juga disangka mengerahkan pembunuh bayaran untuk mengimplementasikan kebijakan *war on drugs* tersebut. Umumnya, pembunuh dibayar sebesar USD 90 untuk setiap pengguna narkoba yang berhasil dibunuh. Sedangkan bagi *drug pusher* yaitu orang yang mempengaruhi orang lain untuk menggunakan narkoba biasanya pembunuh dibayar sebesar USD 150-270. Mereka menyatakan bahwa sejak Duterte menjabat sebagai presiden, jumlah pembunuhan yang harus mereka lakukan meningkat dengan pesat, yakni 3-4 pembunuhan setiap minggunya (Amnesty International 2020).

Lebih buruknya, Duterte juga mendorong masyarakat sipil yang memiliki senjata untuk melakukan hal serupa dengan imbalan uang ataupun penghargaan, sehingga masyarakat pun mulai melakukan pembunuhan acak dengan dalih mengikuti kebijakan anti narkoba yang diterapkan Duterte (Guardian 2016). Menanggapi kebijakan tersebut, sebanyak lebih dari 60.000 pelaku tindak kriminal terkait narkoba menyerahkan diri karena ketakutan akan pembunuhan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Namun, eksekusi pun tetap dilakukan terhadap pelaku yang menyerahkan diri pada pemerintah (Morgan and Groom 2016).

**Gambar 2. 1 Pemetaan Target Kebijakan War On Drugs Duterte**



Sejak awal penerapannya, operasi kebijakan *war on drugs* difokuskan pada kota-kota di sekitar Metro Manila, khususnya pada pemukiman penduduk miskin

karena permasalahan narkoba selalu dikaitkan dengan keterbatasan finansial masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, penggerebekan terhadap tersangka narkoba juga dilakukan di wilayah lain, seperti Laguna, Cavite, dan Bulacan (Talabong, Central Luzon: New killing fields in Duterte's drug war 2019). Di wilayah pedesaan pun, intensitas penggerebekan yang dilakukan oleh aparat terus meningkat, khususnya di wilayah Cebu, yang menyebabkan bertambahnya korban jiwa akibat implementasi kebijakan *war on drugs* (Israel 2019).

### **2.3 Dampak Kebijakan War On Drugs Duterte**

Implementasi kebijakan *war on drugs* oleh pemerintahan Duterte meningkatkan jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk pembunuhan secara signifikan. Pada periode Juli hingga Desember 2016, kepolisian menyatakan telah memeriksa lebih dari lima juta rumah sebagai bentuk kampanye anti narkoba. Dalam operasi tersebut, sebanyak hampir 6.000 orang dibunuh, yang mana 2.086 orang di antaranya tewas dalam operasi resmi yang dilakukan oleh kepolisian dan 3.841 orang lainnya tewas dalam pembunuhan acak atau tanpa proses hukum (Alfaro and Roberts 2016).

Lebih lanjut, diperkirakan lebih dari 256.000 tersangka narkoba telah berhasil ditangkap oleh aparat dalam 176.777 operasi anti narkoba di Filipina. Di samping masyarakat sipil, sebanyak 885 staf pemerintahan juga ditangkap dalam operasi anti narkoba tersebut. Dari angka itu, 431 orang di antaranya merupakan staf umum pemerintahan, 352 orang merupakan pejabat terpilih, dan 102 orang merupakan pejabat berseragam seperti polisi dan tentara. Selain itu, aparat juga

berhasil menyita obat-obatan terlarang senilai P53,46 miliar atau USD 940 juta pada periode operasi tahun 2016-2020 (Marquez 2020).

Akan tetapi, data kepolisian dinilai tidak menunjukkan jumlah korban tewas sebenarnya dalam operasi anti narkoba tersebut. Commission on Human Rights (CHR) menyatakan diperkirakan terdapat lebih dari 27.000 korban jiwa pada periode tahun 2016-2020. Sebagian besar korban merupakan tersangka yang belum terbukti bersalah, tetapi melakukan perlawanan terhadap kepolisian sehingga polisi pun menembak mereka hingga tewas. Bahkan, dalam beberapa kasus, aparat dengan sengaja menjerat masyarakat sipil dengan cara meletakkan barang bukti, seperti narkoba dan senjata, di rumah ataupun di tubuh korban yang memberikan justifikasi bagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian (HRW 2017).

Kondisi itu diperburuk dengan tidak adanya pertanggungjawaban hukum dari aparat penegak hukum ataupun pemerintah terkait operasi *war on drugs*. Pada tahun 2020, pihak kepolisian hanya mendapatkan dakwaan atas satu kasus pembunuhan. Dari 78 kasus yang diinvestigasi oleh Kementerian Kehakiman, hanya 33 kasus yang berujung pada tuntutan terhadap kepolisian, sedangkan kasus lainnya dibatalkan (Talabong, Buan and Gavilan 2019). Di sisi lain, pihak kepolisian pun enggan bekerja sama dalam investigasi kasus pembunuhan di Filipina, misalnya dengan menolak menyerahkan dokumen kepolisian tentang kasus terkait. Hal itu membuat Mahkamah Agung harus turut serta dalam meminta kepolisian untuk menyerahkan dokumen resminya. Namun, pada akhirnya, dokumen yang diserahkan merupakan dokumen yang tidak terkait dengan kasus pembunuhan dalam *war on drugs*, menunjukkan upaya kepolisian untuk menutupi fakta terkait pembunuhan yang banyak terjadi di Filipina (Buan 2019).

Pemerintahan Duterte sendiri juga menolak bertanggung jawab terhadap kasus pembunuhan yang terjadi dalam implementasi kebijakan *war on drugs*. Sejak awal masa pemerintahannya, Duterte menyatakan akan memberikan respons keras bagi pihak-pihak yang mengkritik kebijakannya, termasuk pihak yang berasal dari organisasi internasional ataupun negara lain. Hal tersebut dibuktikan dalam beberapa kasus, seperti serangan terhadap Zeid Ra'ad al-Hussein, perwakilan UN High Commissioner for Human Rights, karena mengkritik pernyataan Duterte yang dinilai mengabaikan pendapat masyarakat (HRW, "Our Happy Family Is Gone": Impact of the "War on Drugs" on Children in the Philippines 2020).

Pihak aktivis kemanusiaan dan media pun mengalami perlakuan serupa dari pemerintahan Duterte. Duterte melakukan berbagai macam cara untuk membungkam mereka yang kritis terhadap kebijakannya. Sebagai contoh adalah penangkapan Maria Ressa, yaitu direktur eksekutif dari media Rappler yang vokal terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Filipina, atas gugatan pencemaran nama baik, yang selanjutnya membuat Ressa ditahan selama enam tahun (Ratcliffe 2020). Di sisi lain, media penyiaran terbesar di Filipina, ABS-CBN, dicabut hak siarnya dengan alasan disinformasi terkait kebijakan *war on drugs* (Ratcliffe, Philippines' main channel forced off-air amid coronavirus lockdown 2020).

Selanjutnya, Duterte memutuskan untuk menarik Filipina dari Undang-undang Roma, yang menjadi dasar atas pembentukan Mahkamah Kriminal Internasional, setelah pengadilan mengumumkan akan melakukan investigasi berdasarkan laporan yang diterima terkait kebijakan Duterte (HRW, "Our Happy Family Is Gone": Impact of the "War on Drugs" on Children in the Philippines 2020). Duterte juga melakukan kampanye disinformasi terhadap UN Human Rights

Council (UNHRC) yang pada saat itu tengah membahas resolusi terkait situasi pelanggaran hak asasi manusia di Filipina (Conde 2019). Sikap Duterte semakin keras pada organisasi-organisasi non pemerintah yang beroperasi dalam lingkup domestik. Misalnya, Security and Exchange Commission mengeluarkan memorandum yang bertujuan untuk memperketat regulasi terhadap organisasi pemerintah yang menerima bantuan dana dari aktor eksternal. Kebijakan tersebut dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menghambat kinerja organisasi yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Duterte (Patina 2019).

Banyak ahli menyatakan bahwa kebijakan *war on drugs* dalam pemerintahan Duterte tidak hanya digunakan untuk mengatasi permasalahan narkoba di Filipina, tetapi juga untuk menyingkirkan oposisi politik Duterte. Terdapat setidaknya 96 politisi yang disebut terlibat dalam kasus narkoba, yang mana 12 di antaranya telah menjalani eksekusi hukuman mati. Buruknya, politisi yang berada dalam daftar Duterte tersebut belum terbukti bersalah melalui proses hukum, sehingga banyak pihak berpendapat bahwa Duterte memanfaatkan kebijakannya untuk mempertahankan posisi politiknya (Kishi, et al. 2018). Organisasi kemanusiaan internasional pun menyebut bahwa kebijakan *war on drugs* Duterte digunakan untuk mengintimidasi lawan politiknya serta menjustifikasi penangkapan dan pembunuhan politisi tersebut (Hincks 2018).

Pada Oktober 2017, Duterte memerintahkan kepolisian untuk menghentikan operasi terkait kebijakan *war on drugs* dan memberikan wewenang kebijakan anti narkoba terhadap Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) (Simbulan, et al. 2019, 2). Keputusan tersebut diambil karena meningkatnya tekanan internasional terhadap kebijakan Duterte, salah satunya adalah deklarasi bersama yang

ditandatangani oleh 39 negara anggota PBB yang menuntut Filipina untuk menghentikan aktivitas pembunuhan di bawah kebijakan *war on drugs*. Di samping itu, dalam deklarasi tersebut, PBB juga meminta pemerintah Filipina untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dan mengizinkan investigasi atas implementasi kebijakan *war on drugs* (Kine 2017).

#### **2.4 Respons Masyarakat Filipina dan Internasional terhadap Dampak Kebijakan *War On Drugs* Filipina**

Kebijakan *war on drugs* Duterte menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia skala besar dan dinilai tidak efektif dalam mengatasi permasalahan narkoba di Filipina. Masyarakat sendiri menyampaikan dukungannya pada Duterte, ditandai dengan elektabilitas Duterte yang mencapai 86% pada survei yang dilakukan oleh Pulse Asia Research. Walaupun banyak pihak yang khawatir akan implementasi kebijakan *war on drugs* yang dinilai ekstrem, tetapi sebagian mendukung keberlangsungan rezim pemerintahan Duterte pada isu-isu yang lain, seperti kebijakan terkait kesenjangan ekonomi dan sosial. Kondisi itu membuat Duterte memiliki legitimasi yang cukup dalam melaksanakan kebijakannya sebagai presiden (Xu 2016).

Di sisi lain, kebijakan *war on drugs* Duterte yang dinilai terlalu ekstrem juga memicu penolakan dari berbagai pihak, bahkan dalam pemerintahan Duterte sendiri. Sebagai contoh, Senator Leila de Lima, yang merupakan mantan ketua Komisi Hak Asasi Manusia Filipina dan mantan menteri kehakiman, mengecam kebijakan *war on drugs* Duterte dan menuntut dilakukannya jejak pendapat terkait pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan pembunuhan tanpa proses hukum. Dalam hal ini, de Lima membentuk tim investigasi yang bertugas untuk



mengawasi implementasi kebijakan Duterte. Namun, menanggapi hal tersebut, Duterte menyatakan ia memiliki bukti bahwa de Lima memiliki relasi dengan sindikat narkoba, yang selanjutnya memicu pemecatan terhadap de Lima dari posisinya di pemerintahan (Xu 2016).

Penolakan dalam lingkup domestik juga mulai dirasakan oleh Duterte pasca eksekusi terhadap beberapa anak di bawah umur yang dianggap terlibat dalam tindak kriminal terkait narkoba. Salah satunya adalah Reynaldo de Guzman, yang berusia 14 tahun, yang ditemukan tewas di sungai dengan 30 luka tusukan dan kepala yang ditutup rapat menggunakan isolasi. Selain de Guzman, terdapat Kian delos Santos, berusia 17 tahun, yang ditembak oleh aparat kepolisian dalam operasi anti narkoba. Akan tetapi, menghadapi protes dari masyarakat dan aktor eksternal terkait penargetan anak di bawah umur, Duterte dan Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre II menyatakan bahwa tewasnya anak-anak tersebut merupakan 'kerusakan tambahan' yang tidak bisa dihindari untuk menangkap pelaku tindak kriminal sesungguhnya. Lebih lanjut, Duterte juga menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak-anak terkadang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintah (Kine 2017).

Akibatnya, respons publik pun semakin keras terhadap kebijakan Duterte, salah satunya ditandai dengan elektabilitas Duterte yang semakin menurun. Pada tahun 2016, elektabilitas Duterte mencapai 86% yang menunjukkan bahwa Duterte memiliki dukungan besar atas pemerintahannya, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan *war on drugs*. Akan tetapi, pada Oktober 2017, survei yang dilakukan oleh Social Weather Stations menunjukkan bahwa elektabilitas Duterte menurun secara signifikan, yakni hanya 48%. Masyarakat mulai melihat bahwa kebijakan

*war on drugs* Duterte tidak membawa dampak signifikan dan justru memunculkan ancaman keamanan. Di samping itu, penyelesaian isu-isu ekonomi dan sosial yang semula disebutkan oleh Duterte pun justru diabaikan dengan dalih fokus kebijakan terhadap *war on drugs*. Kondisi itu diperburuk dengan keputusan aktor eksternal untuk menghentikan kerja sama dengan Filipina sebagai respons atas kondisi domestik Filipina yang tidak stabil (Chandran 2017).

Namun, banyak pihak menyangsikan keputusan Duterte untuk menghentikan perintah pembunuhan terhadap tersangka terkait narkoba. Hal tersebut karena pada Januari 2017, Duterte sempat mengambil keputusan serupa, tetapi kembali melaksanakan kebijakan yang keras pada satu bulan setelahnya. Masyarakat pun mempertanyakan apakah penghentian tersebut akan membawa dampak signifikan dalam mengurangi operasi *war on drugs* oleh ‘*death squads*’ yang dilaksanakan oleh kepolisian (Kine 2017).

Desember 2016 menandai pertama kalinya masyarakat sipil melakukan demonstrasi untuk memprotes kebijakan *war on drugs* yang dilaksanakan oleh Duterte. Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember umumnya menjadi hari tradisional bagi masyarakat untuk melakukan protes terhadap kebijakan Duterte. Selain hari tersebut, masyarakat juga melakukan protes pada hari penting lainnya, seperti 25 Februari untuk memperingati *People Power Revolution* (Lozada 2021). Pada praktiknya, protes yang dilakukan masyarakat diikuti oleh lebih dari 10.000 aktivis kemanusiaan dan advokat, menunjukkan bahwa penolakan terhadap kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat Filipina secara luas (Lozada 2016).

Pada praktiknya, protes yang dilakukan masyarakat diikuti oleh lebih dari 10.000 aktivis kemanusiaan dan advokat. Protes tersebut biasanya diawali di

Manila, kemudian meluas ke wilayah-wilayah lain. Sebagian besar demonstrasi tersebut dipimpin oleh Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN), sebuah organisasi sayap kiri di Filipina, dan Karapatan, yang merupakan organisasi kemanusiaan di Filipina. Demonstrasi secara garis besar menuntut pemerintahan Duterte untuk menghentikan pembunuhan tanpa proses hukum yang dilakukan oleh aparat. Di samping itu, mereka menuntut pembebasan terhadap lebih dari 400 tahanan politik yang ditangkap dengan dalih kebijakan anti narkoba (Lozada, Thousands protest across PH vs Duterte's 'worsening human rights record' 2016).

Aktor domestik, selain masyarakat sipil, yang juga memiliki peran besar dalam penolakan terhadap kebijakan *war on drugs* adalah Gereja Katolik. Filipina merupakan negara penganut Katolik terbesar di Asia, yang selanjutnya membuat Gereja Katolik memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Dalam hal ini, gereja menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan dalam *war on drugs* merupakan tindakan yang ilegal dan tidak bermoral. Untuk melawan kebijakan tersebut, Gereja Katolik di Filipina ikut serta dalam menyediakan tempat berlindung bagi korban *war on drugs*. Namun, tidak semua Gereja Katolik di negara tersebut menolak kebijakan *war on drugs*, dibuktikan dengan beberapa gereja di Mindanao, tempat asal Duterte, yang mendukung implementasi kebijakan *war on drugs* (Lozada 2021).

Organisasi non pemerintah (NGO) pun ikut serta dalam penolakan terhadap kebijakan *war on drugs* di Filipina melalui aktivitas lobi terhadap organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintahan Duterte agar menghentikan tindak kekerasan dalam kebijakannya. Terdapat lebih dari 300 NGO yang telah mengajukan keluhannya kepada badan-badan PBB, khususnya UN Office on Drugs

and Crime (UNODC), untuk mencegah pembunuhan yang dilakukan oleh Duterte. Di samping itu, NGO juga meminta UNHRC untuk menginvestigasi implementasi kebijakan *war on drugs* melalui pembentukan jaringan advokasi transnasional yang berisi NGO-NGO dari berbagai negara (Lozada 2021).

Tidak hanya aktor domestik, aktor eksternal pun turut vokal dalam menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan Duterte, sebagai contoh adalah organisasi internasional Human Rights Watch dan Amnesty International yang menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Duterte merupakan tindak kriminal terhadap kemanusiaan yang melanggar hukum internasional. Uni Eropa juga menyatakan hal serupa dan menuntut pemerintah Filipina untuk mengimplementasikan kebijakan anti narkoba dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari masyarakat Filipina (Xu 2016).

UNHRC menjadi salah satu entitas yang paling vokal menyuarakan kritik terhadap *war on drugs* di Filipina. Pada Juli 2019, UNHRC melakukan pemungutan suara terkait pelaksanaan investigasi terhadap pemerintahan Duterte. Perundingan tersebut didasari oleh meningkatnya jumlah korban tewas dalam operasi *war on drugs* di Filipina, yakni 490 kasus kematian hanya pada tahun 2019. Di samping itu, pada bulan Juni, operasi *war on drugs* menimbulkan korban seorang balita berusia tiga tahun yang tewas tertembak di kepala. Buruknya, Kepala Kepolisian Ronald dela Rosa menyebut tragedi tersebut hanya sebagai kesialan yang tidak sengaja terjadi, memicu kritik dari masyarakat internasional (Ellis-Petersen 2019).

Perundingan UNHRC tersebut menghasilkan resolusi yang mewajibkan pembuatan laporan tertulis terkait kondisi hak asasi manusia di Filipina dengan fokus pada kasus pembunuhan tanpa proses hukum dan penangkapan paksa (BBC

2019). Melalui resolusi tersebut, Kepala UNHRC Michelle Bachelet memiliki wewenang untuk memeriksa bukti-bukti terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kepolisian dan ‘*death squads*’. Walaupun tidak signifikan, resolusi tersebut menjadi langkah penting untuk mencapai keadilan dan pertanggungjawaban pemerintahan Duterte (Ellis-Petersen 2019). Sebaliknya, Duta Besar Filipina untuk PBB menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak sesuai dengan kondisi kemanusiaan yang sesungguhnya terjadi di Filipina sehingga pemerintah Filipina menolak resolusi yang dinilainya tidak netral (BBC 2019).

Selain UNHRC, OHCHR juga kerap mengeluarkan pernyataan kritis terhadap *war on drugs* di Filipina sejak tahun 2016. Dalam hal ini, OHCHR meminta pemerintah Filipina untuk bersikap kooperatif dan mengizinkan investigasi yang dilakukan oleh staf-staf dari OHCHR. Menanggapi hal tersebut, Duterte menolak adanya investigasi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Bahkan, Duterte juga mengancam Agnes Callamard, salah satu staf OHCHR, dengan kekerasan jika Callamard memaksakan diri untuk melakukan investigasi atas kebijakan *war on drugs* di Filipina (Lozada 2021).

ICC pun turut terlibat dalam upaya penyelesaian kasus pembunuhan di Filipina. Aktivis kemanusiaan dan keluarga dari korban mengajukan gugatan kepada ICC terkait keterlibatan Duterte dalam pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukannya sebagai bagian dari kebijakan *war on drugs*. Gugatan itu mendorong ICC untuk melakukan investigasi awal terhadap Filipina yang dipimpin oleh jaksa Fatou Bensouda. Akan tetapi, juru bicara presidensial Filipina Harry Roque menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak mempengaruhi pemerintahan Filipina (Mogato and Petty 2018). Hal tersebut karena Filipina telah mengundurkan

diri secara sepihak dari Undang-undang Roma pada tahun 2018, sehingga aktivitasnya tidak lagi berada di bawah pengawasan ICC. Dalam hal ini, Duterte menyatakan bahwa hukum domestik memiliki posisi yang lebih kuat dibanding hukum internasional sehingga keterlibatan ICC merupakan hal yang tidak dapat diterima oleh Filipina (Sullivan 2018).

Oleh karena itu, Duterte pun menolak investigasi yang akan dilakukan oleh ICC di Filipina. Bahkan, Duterte menyatakan akan menangkap jaksa dari ICC, Fatou Bensouda, jika ia bersikukuh untuk melakukan investigasi. Duterte juga menyebut akan mempengaruhi negara-negara lain untuk keluar dari mekanisme ICC (Mogato and Petty 2018). Menanggapi pernyataan Duterte, ICC menyebutkan bahwa Filipina masih merupakan bagian dari kekuasaan hukum ICC hingga penarikan dirinya berlaku secara resmi pada Maret 2019. Dengan demikian, ICC memiliki wewenang untuk menginvestigasi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Filipina jika tindakan tersebut terjadi pada periode November 2011 hingga Maret 2019 (ICC 2021).

Ironisnya, walaupun kebijakan *war on drugs* menerima banyak penolakan, baik dari masyarakat domestik maupun aktor internasional, survei yang dilakukan oleh Social Weather Stations menunjukkan bahwa banyak pula penduduk Filipina yang mendukung keberhasilan kebijakan *war on drugs*. Sebanyak 82% responden menyatakan puas dengan kebijakan tersebut, dengan anggapan bahwa kebijakan itu berhasil mengurangi tindak kriminal, khususnya terkait narkoba, di Filipina (Reuters 2019). Hal itu membuat Duterte menjadi presiden dengan tingkat popularitas tertinggi dalam sejarah Filipina. Pada Desember 2019, elektabilitas Duterte kembali meningkat hingga 72% setelah sebelumnya mengalami penurunan

tajam. Selanjutnya, pada Oktober 2020, tingkat elektabilitas Duterte kembali naik menjadi 87% (Lozada 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan *war on drugs* pun dapat terus dilakukan hingga akhir masa jabatan Duterte.

## **2.5 Gambaran Umum Amnesty Internasional**

Amnesty International merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan HAM sesuai dengan hukum internasional yang berlaku terkait HAM, misalnya *Universal Declaration of Human Rights*. Amnesty International dibentuk pada tahun 1961 oleh Peter Benenson dan memiliki pusat di Inggris (Amnesty International 2002). Hingga saat ini, Amnesty International memiliki lebih dari sepuluh juta anggota dan pendukung, serta beroperasi di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Dalam situs resminya, Amnesty International menyatakan bahwa organisasi tersebut tidak terlibat dengan kelompok politik, ekonomi, ataupun agama, menunjukkan bahwa Amnesty International merupakan organisasi yang independen (Amnesty International n.d.). Bahkan, dalam sektor pendanaan pun, Amnesty International dibiayai secara mandiri, baik melalui iuran yang dibayarkan oleh anggota, kontribusi sukarela, ataupun donasi dari pendukungnya.

Pada tahun 1977, Amnesty International memperoleh penghargaan Nobel Peace Prize atas aktivitasnya untuk melawan kekerasan yang terjadi di dunia. Kemudian pada tahun 1978, Amnesty International juga memperoleh penghargaan atas HAM dari PBB (Amnesty International 2002). Salah satu pencapaian terbesar Amnesty International adalah kampanye pembentukan International Criminal Court (ICC) pada tahun 2002 dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi

pelaku tindak kriminal. Hal itu membuat Amnesty International pun diakui oleh masyarakat internasional sebagai organisasi penting dalam bidang kemanusiaan (Amnesty International n.d.).

Amnesty International memiliki visi agar semua orang terlindungi hak asasinya oleh hukum internasional yang berlaku. Untuk mencapai visi tersebut, Amnesty International melakukan penelitian dan mengorganisasi kampanye yang bertujuan untuk melindungi HAM, serta mencegah dan mengakhiri pelanggaran terhadap HAM. Dengan kata lain, Amnesty International berperan sebagai advokat dalam mencapai perlindungan terhadap HAM di seluruh dunia. Hal tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah, organisasi antar pemerintah, kelompok politik, perusahaan, dan aktor non-negara lainnya. Dengan demikian, Amnesty International dapat memobilisasi aktor-aktor tersebut untuk lebih tanggap terhadap isu HAM (Amnesty International 2019, 1).

Secara spesifik, aktivitas Amnesty International terbagi ke dalam beberapa aksi kunci, yaitu sebagai berikut.

- a. Perlindungan terhadap perempuan;
- b. Perlindungan terhadap anak-anak;
- c. Menghentikan tindak penyiksaan dan eksekusi;
- d. Perlindungan terhadap tahanan keyakinan;
- e. Perlindungan terhadap pengungsi;
- f. Perlindungan dari pelanggaran HAM yang mengganggu integritas fisik dan psikologis individu;
- g. Menghapuskan hukuman mati, penyiksaan, dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan terhadap tahanan;



- h. Peradilan yang adil dan cepat bagi tahanan politik;
- i. Mengatasi permasalahan diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang;
- j. Regulasi terkait perdagangan senjata global.

Selain aksi-aksi tersebut, Amnesty International juga berupaya memberikan perlindungan bagi individu dalam zona konflik, mengakhiri pembunuhan dan penghilangan paksa bagi tersangka politik, memastikan kondisi penjara sesuai dengan standar HAM internasional, menyediakan pendidikan gratis bagi anak, dan menghentikan perekrutan anak di bawah umur ke pasukan militer. Dalam praktiknya, Amnesty International beroperasi dengan prinsip solidaritas internasional, keamanan global, universalitas HAM, ketidakberpihakan, kemandirian, demokrasi, dan rasa saling menghormati (Amnesty International 2019, 1).

Di Filipina, Amnesty International Filipina secara resmi terdaftar sebagai anak organisasi Amnesty International pada tahun 1987. Dari organisasi yang semula beranggotakan empat orang, Amnesty International Filipina berubah menjadi organisasi skala besar dengan lebih dari 20.000 anggota pada tahun 2019. Dalam perkembangannya, Amnesty International Filipina berhasil berkontribusi dalam adopsi regulasi nasional, seperti *Anti-Torture Act* (2009), *Anti-Disappearance Act* (2012), dan *Human Rights Victims Reparation and Recognition Act* (2013). Di samping itu, organisasi tersebut juga terlibat dalam pembuatan hukum dan perjanjian internasional terkait HAM, seperti *Rome Statute on the International Criminal Court* (2011) dan *Optional Protocol on the Convention Against Torture* (2012) (Amnesty International Philippines n.d.).





**BAB 3**

**PERAN AMNESTY INTERNATIONAL DALAM MERESPONS**

**KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DI FILIPINA**

Pada penelitian ini, peran Amnesty International dalam merespons kebijakan *war on drugs* Duterte dilihat melalui tiga poin, yakni advokasi dan lobi, edukasi dan meningkatkan kesadaran publik, menyusun politik agenda. Namun, pembahasan akan ditekankan pada peran Amnesty International sebagai jaringan advokasi dan lobi transnasional.

**3.1 Advokasi dan Lobi**

Advokasi menjadi salah satu peran utama organisasi non-pemerintah dalam hubungan internasional, karena organisasi tersebut menjalankan fungsi sebagai jaringan advokasi transnasional. NGO disebut sebagai jaringan advokasi karena aktivitasnya yang berupaya untuk mendukung atau melindungi kepentingan orang lain. Ahmed dan Potter (2006, 44) menyebutkan bahwa dalam upaya mempengaruhi politik internasional, jaringan advokasi terlibat dalam tiga bentuk politik, yaitu (1) politik informasi, yang mana jaringan menyediakan dan meinterpretasikan kembali informasi terkait isu tertentu; (2) politik pengaruh, yang mana jaringan berupaya untuk mendapatkan pengaruh dari aktor yang lebih kuat, seperti negara dan organisasi internasional; serta (3) politik akuntabilitas, yang mana jaringan mendorong negara untuk mengikuti norma dan prinsip yang sebelumnya telah mereka setujui.

Di sisi lain, lobi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung advokasi. Dalam situasi ketika kepentingan NGO terhalang oleh kebijakan

pemerintah domestik tempat NGO itu berasal, NGO akan menyalurkan isu tersebut ke komunitas-komunitas lainnya dalam sistem internasional, mulai dari NGO lain hingga organisasi internasional yang dinilai dapat memberikan tekanan bagi pemerintah. Oleh karena itu, jaringan advokasi NGO memiliki peran penting dalam mempengaruhi pemerintahan domestik (Ahmed and Potter 2006, 44-45).

Selanjutnya, aktivitas advokasi dan lobi yang dilakukan oleh Amnesty International terkait pelanggaran HAM di Filipina dibagi ke dalam tiga bentuk politik sebagai berikut.

a. Politik Informasi

Politik informasi dapat dilihat melalui upaya Amnesty International untuk menyebarkan informasi terkait isu-isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Duterte. Dalam hal ini, salah satu yang dilakukan oleh Amnesty International adalah dengan mempublikasikan artikel yang membahas tentang kebijakan *war on drugs* Duterte sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Sebagai contoh, Amnesty International mengunggah artikel terkait detail kondisi HAM di Filipina pada 8 Juli 2019. Dalam artikel tersebut, dijelaskan tindak pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemerintahan Duterte beserta dengan perkiraan jumlah korban tewas dalam kebijakan *war on drugs* yang didasarkan pada laporan '*They Just Kill*' yang juga diterbitkan oleh Amnesty International (Amnesty International Australia 2019). Selanjutnya, pada 22 Juli 2019, Amnesty International mengunggah artikel yang ditulis berdasarkan jumpa pers yang dilakukan oleh Butch Olano, Direktur Bagian Amnesty International Filipina. Artikel tersebut menjelaskan tentang penolakan Amnesty International terhadap

keinginan Duterte untuk melaksanakan kembali hukuman mati bagi tersangka kejahatan narkoba. Olano menyebutkan bahwa keputusan tersebut akan semakin memperburuk kondisi HAM di Filipina dengan mengatasnamakan kebijakan anti-narkoba (Amnesty International 2019).

Pada 26 Juli 2021, Amnesty International menerbitkan artikel daring sebagai respon atas *State of the Nation Address* yang dinilai mengancam dan menjustifikasi pembunuhan tanpa proses hukum di Filipina. Amnesty International memberikan kritik terkait kondisi faktual yang terjadi di Filipina, mulai dari dorongan Duterte untuk pembunuhan tanpa proses hukum dan respons negatif Duterte terhadap upaya investigasi ICC. Di samping itu, Amnesty International juga menyebutkan bahwa pembunuhan tidak hanya dilakukan terhadap tersangka narkoba, tetapi juga terhadap aktivis yang melakukan kritik, dengan tujuan untuk menghindari akuntabilitas (Amnesty International Filipina 2021).

#### b. Politik Pengaruh

Amnesty International menyatakan bahwa pemerintahan Duterte tidak mampu untuk melakukan investigasi secara mandiri sehingga diperlukan adanya campur tangan dari aktor eksternal dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Filipina. Hal tersebut ditandai dengan tidak berkurangnya tindak kekerasan yang terjadi di negara tersebut, bahkan justru bertambah. Amnesty International memandang bahwa tindak kekerasan, termasuk pembunuhan, justru mendapat dukungan besar dari pemerintah (Amnesty International 2020).

Amnesty International mengeluarkan seruan terhadap PBB untuk segera melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM dan tindak kriminal lainnya terhadap kemanusiaan yang dilakukan dengan mengatasnamakan kebijakan *war on*

*drugs*. Seruan tersebut dilakukan oleh Nicholas Bequelin, yaitu Direktur Regional Amnesty International Bagian Asia Timur dan Tenggara pada Juni 2019. Bequelin menyatakan bahwa kebijakan *war on drugs* tidak lebih dari pembunuhan skala besar yang merugikan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin. Lebih lanjut, Bequelin menuntut PBB untuk bertindak tegas dengan meminta pertanggungjawaban dari Presiden Duterte dan pemerintahannya. Aktivitas tersebut dapat diawali dari UNHRC sebagai badan milik PBB yang bergerak di bidang HAM (Amnesty International 2019).

Di samping melalui jumpa pers, seruan terhadap PBB juga dilakukan melalui publikasi artikel daring di situs resmi Amnesty International. Dalam artikel yang diterbitkan pada am 2019, Amnesty International menjelaskan situasi pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Filipina sejak diimplementasikannya kebijakan *war on drugs*. Lebih lanjut, artikel tersebut menekankan pada kondisi pelanggaran yang mengkhawatirkan sejak tewasnya Kian delos Santos, yang menjadi salah satu kasus pembunuhan di Filipina yang mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Selain itu, Amnesty International juga menyayangkan program rehabilitasi narkoba yang dinilai tidak layak bagi terdakwa pengguna narkoba. Oleh karena itu, Amnesty International meminta UNHRC untuk segera menginisiasi investigasi independen terkait pelanggaran HAM pada kebijakan *war on drugs* (Amnesty International 2019).

*“The organization (Amnesty International) is calling on the UN Human Rights Council to immediately initiate an independent, impartial and effective investigation into human rights violation in the “war on drugs,” including the commission of crimes under international law.”* (Bequelin, 2019 dalam Amnesty International 2019)

Menanggapi respons masyarakat internasional terhadap pelanggaran HAM di Filipina, pada 11 Juli 2019, UNHRC menyatakan bahwa organisasi tersebut akan

menginvestigasi tindak kriminal yang dilakukan oleh pemerintah Filipina selama pelaksanaan kebijakan *war on drugs*. Di samping itu, UNHRC juga meloloskan resolusi yang mengharuskan Kepala UNHRC Michele Bachelet untuk menyiapkan laporan lengkap terkait pembunuhan tanpa proses hukum, penghilangan paksa, dan penangkapan sewenang-wenang di Filipina. Resolusi tersebut didukung oleh 18 dari 47 negara anggota dewan, dengan 14 lainnya menolak, dan 15 lainnya abstain (Sant 2019).

Pasca dikeluarkannya resolusi tersebut, Amnesty International menyatakan bahwa resolusi UNHRC memberikan harapan bagi masyarakat sipil yang terdampak di Filipina. Resolusi tersebut juga memberikan dorongan bagi masyarakat Filipina untuk semakin berani menentang kebijakan *war on drugs*. Untuk mendukung resolusi UNHRC, Amnesty International meminta pemerintah Filipina agar bekerja sama untuk melakukan investigasi.

*“We urge the Philippines to cooperate with the UN Human Rights Office leading the investigation and take urgent measures to halt the brutal killings that have become the hallmark of the Duterte administration's campaign. If they do not, the Council may take further and more robust action.”* (Sant 2019)

Di sisi lain, pemerintah Filipina melalui Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin menyatakan penolakannya terhadap resolusi UNHRC tersebut. Locsin menyebut bahwa UNHRC tidak menghormati usaha yang selama ini telah dilakukan oleh Filipina dalam mendukung aktivitas UNHRC sejak pembentukannya pada tahun 2006. Lebih lanjut, Locsin menyatakan bahwa resolusi tersebut ‘berat sebelah’ dan hanya mendukung kepentingan kelompok partisan politik tertentu saja sehingga tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Filipina (Berlinger 2019).



Salvador Panelo, juru bicara Presiden Duterte, menyatakan bahwa resolusi yang dikeluarkan oleh UNHRC merupakan bentuk intervensi politik yang tidak menghormati kedaulatan negara Filipina. Ia juga menyangkal tuduhan yang diberikan kepada Filipina terkait eksekusi yang disebut didukung oleh pemerintah. Walaupun demikian, pihak kepolisian Filipina mengakui bahwa pada periode tahun 2016-2019, jumlah korban tewas mencapai 6.600 orang. Akan tetapi, kepolisian menekankan bahwa tewasnya korban tersebut merupakan akibat dari konflik kekerasan dua arah antara polisi dan sipil, bukan merupakan eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pemerintah (Regencia 2019).

Adanya tekanan internasional tidak membuat Duterte menghentikan tindak kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan *war on drugs*-nya. Melihat hal tersebut, Amnesty International kembali mengajukan seruan kepada PBB melalui jumpa pers yang dilakukan pada 25 September 2020. Dalam jumpa pers tersebut, Amnesty International menuntut pembentukan badan independen di bawah PBB yang bertugas untuk melakukan investigasi secara mendalam terkait pelanggaran HAM di Filipina.

*“Amnesty International, together with a coalition of other human rights organisations, is urging the HRC to establish an independent body to conduct an in-depth investigation into human rights violations and abuses committed in the Philippines since 2016. ... It now falls to the Human Rights Council to mandate a strong, independent investigative body – all while honouring the High Commissioner’s repeated calls to continue monitoring the Philippines’ human rights crisis.”* (Amnesty International 2020)

Pemerintah Filipina, bekerja sama dengan UNHRC, membentuk dewan antar pemerintah khusus yang ditugaskan untuk meninjau 5.600 kasus pembunuhan tanpa proses hukum yang terjadi dalam operasi anti-narkoba. Namun, Amnesty International menilai dewan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Filipina karena tidak adanya lanjutan pasca

pembentukan dewan tersebut. Justru, dewan tersebut terkesan menutupi fakta kekerasan yang terjadi di lapangan. Kondisi itu diperburuk dengan pandemi Covid-19 yang dinilai berpengaruh terhadap meningkatnya kasus pembunuhan tanpa proses hukum, sebagai akibat dari keterbatasan mobilitas masyarakat (Amnesty International 2020).

Namun, PBB justru mengadopsi resolusi yang dinilai tidak mendukung upaya masyarakat internasional untuk menyelesaikan isu pelanggaran HAM di Filipina. Pada Oktober 2020, UNHRC mengadopsi resolusi yang mana menyatakan bahwa PBB akan memberikan bantuan teknis kepada Filipina untuk memastikan bahwa pemerintah Filipina melakukan investigasi terhadap kasus pelanggaran HAM dengan tepat (Nebhay 2020). Menanggapi hal tersebut, Amnesty International menyatakan bahwa bantuan teknis tidak memberi dampak signifikan dalam mengatasi situasi HAM di Filipina. Dibutuhkan investigasi internasional penuh agar kasus tersebut dapat diatasi secara efektif. Di samping itu, Amnesty International menyebut bahwa PBB telah kehilangan kesempatan untuk mencapai keadilan di Filipina karena secara tidak langsung membantu Filipina untuk menghindari investigasi internasional resmi (Amnesty International 2020).

Walaupun terkesan banyak memberikan kritik pada minimnya keterlibatan aktor lain dalam isu HAM di Filipina, Amnesty International juga memberikan apresiasi kepada organisasi yang dianggap telah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam menyelesaikan isu pelanggaran HAM di Filipina. Sebagai contoh, pada Juni 2021, Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menyebut bahwa keputusan ICC untuk melakukan investigasi formal terhadap

pemerintahan Duterte merupakan langkah penting dalam mencapai keadilan di Filipina.

*“This announcement is a moment of hope for thousands of families in the Philippines who are grieving those lost to the government’s so-called “war on drugs”. This is a much-awaited step in putting murderous incitement by President Duterte and his administration to an end.”* (Callamard, 2021 dalam Amnesty International 2021)

Callamard juga menyebutkan bahwa keputusan ICC memberikan pesan penting bagi pelaku pelanggaran dan pihak-pihak lainnya yang terlibat bahwa mereka akan bertanggung jawab atas segala tindak kriminal yang mereka lakukan. Callamard menekankan pentingnya bagi Duterte untuk mempertimbangkan penghentian pembunuhan dan mendorong pelaku untuk diadili secara hukum (Amnesty International 2021).

Di sisi lain, dengan melihat keputusan ICC untuk melakukan investigasi terhadap Filipina, Amnesty International menekankan pada pentingnya dukungan dari organisasi lain, seperti UNHRC. Dalam hal ini, Amnesty International menilai bahwa UNHRC selama ini gagal dalam mengatasi situasi berbahaya yang terjadi di Filipina. Selain itu, UNHRC juga dinilai tidak memberikan posisi dan pesan yang tegas kepada pemerintah Filipina, yang menyatakan bahwa organisasi tersebut mengecam tindakan pemerintah, khususnya terkait tindak pembunuhan tanpa melalui proses hukum.

*“The UN Human Rights Council must launch its long overdue investigation into the Philippines to examine crimes under international law and other serious violations of human rights committed over the full duration of the Duterte administration, including as part of the so-called “war on drugs”. The perpetrators and architects of these crimes must be held to account.”* (Callamard, 2021 dalam Amnesty International 2021)

Amnesty International juga mengimbau masyarakat Filipina untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin, khususnya dengan mempertimbangkan kandidat-

kandidat yang pro-HAM. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi HAM di Filipina yang semakin menurun sejak kepemimpinan Presiden Duterte. Bahkan, kondisi HAM di Filipina di bawah pemerintahan Duterte dinilai sebagai yang terburuk sejak masa kepemimpinan diktator Ferdinand Marcos. Oleh karena itu, Amnesty International meminta publik untuk lebih memahami histori kebijakan dari kandidat pemimpin-pemimpin selanjutnya, sehingga permasalahan HAM di negara tersebut dapat teratasi (Cabico 2019).

Tidak hanya melakukan advokasi dan lobi terkait isu pelanggaran HAM di Filipina secara langsung, Amnesty International juga berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara tidak langsung. Contohnya dengan meminta penghentian perdagangan senjata dari Amerika Serikat ke Filipina untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan senjata sebagai instrumen untuk menekan masyarakat sipil. Pada 25 Agustus 2020, Amnesty International Amerika Serikat mengirimkan surat terbuka kepada House Foreign Affairs Committee (HFAC) untuk menghentikan penjualan senjata ke Filipina. Hal tersebut didasari atas kekhawatiran jika 156 senjata mesin yang diperdagangkan pada periode tersebut justru disalahgunakan di Filipina dan semakin memperburuk situasi HAM di negara itu (Amnesty International USA 2020).

Kekhawatiran itu diperburuk dengan kondisi yang mana Presiden Duterte menandatangani *Anti-Terror Law* yang membuat aktivis pro-demokrasi dan HAM, organisasi masyarakat sipil, dan anggota dari kelompok politik oposisi semakin terancam (Amnesty International USA 2020). Salah satu bukti adalah tewasnya Zara Alvarez, seorang aktivis HAM, dan Randall Echanis, seorang advokat perdamaian, yang diperkirakan diakibatkan oleh serangan dari aparat. Hal tersebut

karena keduanya berada pada daftar penangkapan sebagai ‘teroris’ yang membuat mereka muncul sebagai target pembunuhan aparat (Amnesty International 2020).

Dalam hal ini, Amnesty International menuntut HFAC untuk meminta informasi lengkap tentang penggunaan senjata, termasuk di antaranya memastikan bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan untuk tindakan yang melanggar HAM. Hal tersebut karena Duterte dinilai sebagai pemimpin yang memiliki kecenderungan untuk melakukan operasi terhadap masyarakat sipil Filipina. Karenanya, penghentian suplai senjata ataupun permintaan keterangan penggunaan senjata merupakan hal penting untuk mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina (Amnesty International USA 2020).

c. Politik Akuntabilitas

Politik akuntabilitas yang dilakukan oleh Amnesty International dapat dilihat dari upaya organisasi tersebut untuk mempengaruhi pemerintah Filipina agar menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang sebelumnya telah disetujui oleh Filipina. Pada Juli 2020, Presiden Duterte menyatakan akan menerapkan kembali hukuman mati bagi pelaku tindak kriminal, khususnya tindak kriminal terkait narkoba. Menanggapi pernyataan Duterte, Amnesty International menyebut bahwa penerapan hukuman mati tidak akan mengurangi jumlah kasus terkait narkoba, tetapi justru meningkatkan rasa cemas masyarakat (Amnesty International 2020).

Di samping itu, Filipina juga merupakan bagian dari *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, yaitu perjanjian internasional yang menekankan pada komitmen negara untuk menghapuskan hukuman mati. Dengan menerapkan hukuman mati kembali, Duterte akan melanggar komitmennya terhadap perjanjian internasional tersebut

dan menunjukkan bahwa pemerintah Filipina tidak menghargai kerja sama internasional yang sebelumnya ia setuju (Amnesty International 2020).

Amnesty International juga meminta pemerintah Filipina untuk kembali memberikan hak siar bagi media ABS-CBN yang sebelumnya dicabut karena menyiarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Amnesty International menyebut bahwa tindakan Duterte merupakan upaya untuk menghilangkan kebebasan berekspresi media dan masyarakat. Terutama dalam kondisi pandemi Covid-19, penyebaran informasi merupakan hal yang penting sehingga dihentikannya siaran ABS-CBN sama halnya dengan menghambat informasi yang menjadi hak masyarakat (Amnesty International Thailand 2020).

Pada Juli 2021, Amnesty International melalui perwakilannya Rachel Chhoa-Howard mengecam tindakan Presiden Duterte yang dinilai berkali-kali menolak untuk bekerja sama dalam menginvestigasi kasus pembunuhan tanpa proses hukum (Amnesty International 2021). Dalam hal ini, Amnesty International mendukung hasil keputusan ICC yang meminta Filipina untuk tetap terlibat dalam investigasi yang dilakukan oleh ICC, walaupun Filipina telah menarik diri secara resmi dari Roma Statute.

*“Try as they might, Duterte’s administration cannot stop the wheels of justice. Whether they like it or not, international justice will eventually catch up with those who have committed crimes under international law in the Philippines.”* (Chhoa-Howard 2021, dalam Amnesty International 2021).

Kebijakan *war on drugs* Duterte tidak hanya berdampak pada peningkatan kasus pembunuhan secara signifikan, tetapi juga pelanggaran HAM bagi tersangka yang ditahan di penjara. Hal tersebut karena penjara Filipina merupakan salah satu dari yang terburuk di dunia. Kondisi itu dibuktikan dengan terlalu banyaknya jumlah tahanan dibandingkan dengan kapasitas penjara yang ada. Sebagai contoh,

di penjara Biro Koreksi, jumlah tahanan mencapai 50.000 orang, atau 300% dari kapasitas penjara tersebut. Di Biro Manajemen dan Pidana Penjara, jumlah tahanan mencapai lebih dari 100.000 orang, atau 500% dari kapasitas fasilitas penjara tersebut (Amnesty International 2020).

Menanggapi situasi tersebut, Amnesty International menuntut pemerintah Filipina untuk segera membebaskan tahanan, atau setidaknya memperbaiki fasilitas penjara agar lebih layak untuk digunakan. Diperlukan adanya perbaikan skala besar agar tahanan dapat mengakses hak-hak dasarnya, seperti makanan, air bersih, dan kesehatan. Terlebih pada masa pandemi Covid-19, terlalu penuhnya fasilitas penjara justru mendukung penyebaran virus corona di Filipina. Dengan pembebasan sebagian tahanan, hal itu dapat membantu mengurangi jumlah tahanan berlebih di penjara serta mengurangi resiko penyebaran Covid-19 (Amnesty International 2020).

Di samping itu, Amnesty International juga meminta pemerintah untuk membebaskan tahanan politik dan aktivis HAM yang sebelumnya ditahan karena menyuarakan kritik terhadap kebijakan anti-narkoba yang diterapkan oleh Duterte. Beberapa di antaranya adalah Senator Leila de Lima, Wakil Presiden Leni Robredo, jurnalis Maria Ressa, dan Sekretaris Jenderal Karapatan Cristina Palabay. Tidak hanya menahan pihak-pihak yang kontra terhadap kebijakan, Duterte juga memberikan sanksi yang dinilai tidak masuk akal oleh Amnesty International, seperti pembekuan aset dan larangan bepergian. Pemerintah juga membatasi komunikasi pihak-pihak tersebut untuk menghindari penyebaran informasi terkait ketidakadilan dalam kebijakan anti-narkoba (Amnesty International 2020).

Melalui publikasi *Universal Periodic Review* (UPR), Amnesty International memberikan laporan tentang implementasi kebijakan *war on drugs* yang dilakukan oleh Duterte. Pada UPR yang dipublikasikan tahun 2022, Amnesty International menyebut bahwa sebelumnya, pada tahun 2017, organisasi tersebut telah memberikan 257 rekomendasi bagi pemerintah Filipina untuk menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran HAM di Filipina. Hingga tahun 2022, pemerintah hanya mendukung 103 rekomendasi, sementara 154 rekomendasi lainnya ditolak. Sebanyak 39 rekomendasi yang ditolak merupakan rekomendasi untuk mengakhiri dan menginvestigasi eksekusi tanpa proses hukum. Selain rekomendasi Amnesty International, UPR juga menjelaskan berbagai kerangka ataupun putusan lain yang tidak diterima ataupun diimplementasikan oleh Filipina (Amnesty International 2022).

Upaya Amnesty International untuk mempengaruhi pemerintah Filipina juga dilakukan dengan melobi Partai Liberal sebagai partai oposisi dari Duterte. Dalam hal ini, Amnesty International mendukung Leni Robredo Wakil Presiden Filipina yang berasal dari Partai Liberal untuk dapat memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala *Inter-agency Committee on Anti-illegal Drugs* (ICAD) untuk menerapkan kebijakan anti-narkoba yang juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih, sebelumnya Robredo merupakan pihak yang vokal dalam menolak adanya tindak kekerasan dalam kebijakan *war on drugs* (Amnesty International 2019). Namun, sistem partai yang lemah di Filipina membuat upaya tersebut tidak berjalan dengan optimal. Pasalnya, masyarakat Filipina cenderung hanya mendukung individu tanpa memperhatikan partai politik pengusungnya (Simons 2019). Dengan demikian, upaya lobi terhadap pemerintah pun dilakukan



langsung terhadap individu-individu yang terlibat dalam pemerintahan, dibanding bekerja sama dengan partai politik.

Pemerintah, sebagai pengambil keputusan utama dalam negara, berperan penting dalam tercapainya tujuan dari Amnesty International untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Filipina yang diakibatkan oleh kebijakan *war on drugs*. Keputusan yang diambil oleh pemerintah memiliki nilai yang kuat dan terlegitimasi sehingga lobi terhadap pemerintah merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, Amnesty International pun melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemerintah Filipina agar bertanggung jawab dan kembali menerapkan norma-norma yang sebagaimana mestinya dilakukan. Jika pemerintah mengambil posisi yang serupa dengan Amnesty International, diperkirakan aktor-aktor lain pun akan mengambil jalan yang sama.

### **3.2 Meningkatkan Kesadaran melalui Edukasi**

Edukasi dan peningkatan kesadaran publik merupakan hal penting dalam aktivitas NGO yang bertujuan untuk mencapai implikasi politik. Hal tersebut karena opini publik merupakan hal penting dalam advokasi NGO sehingga sosialisasi politik pun menjadi salah satu inti dalam aktivitas NGO. Terlebih bagi NGO yang bergerak di bidang HAM, seperti Amnesty International, publisitas dapat berpengaruh signifikan bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Publisitas dilakukan dengan cara menempatkan isu HAM dalam agenda politik internasional (Ahmed and Potter 2006, 48).

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM terkait kebijakan *war on drugs* di Filipina, edukasi terhadap masyarakat dan aktor-aktor lainnya merupakan hal yang krusial. Untuk itu, Amnesty International pun terlibat dalam aktivitas edukasi dan penyebaran informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik. Edukasi dilakukan dengan cara mempublikasikan artikel ataupun laporan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina. Dengan demikian, isu pelanggaran tersebut dapat diketahui oleh publik secara luas, termasuk dengan detail-detail yang dilarang untuk dipublikasikan melalui media.

'*They Just Kill*' merupakan salah satu laporan yang diterbitkan oleh Amnesty International pada tahun 2019. Dalam laporan tersebut, Amnesty International menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan mengatasnamakan *war on drugs*, seperti pembunuhan tanpa melalui proses hukum, penyalahgunaan daftar tersangka tindak kejahatan narkoba, serta rehabilitasi dan perawatan yang dinilai tidak manusiawi (Amnesty International 2019). Dengan mempublikasikan laporan tersebut, Amnesty International bertujuan agar publik dapat memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi di Filipina.

Pada tahun 2020, Amnesty International kembali mempublikasikan laporan terkait pelanggaran HAM di Filipina. Laporan berjudul '*My Job is To Kill*' tersebut menjelaskan banyak hal terkait pembunuhan tanpa proses hukum yang terjadi di Filipina. Dalam laporan tersebut, Amnesty International memfokuskan pada bagaimana hak-hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat dibatasi di Filipina, khususnya terkait kritik yang diberikan terhadap kebijakan *war on drugs*. Di samping itu, laporan tersebut juga membahas tentang serangan-serangan yang

dihadapi oleh aktivis dan masyarakat secara umum yang dianggap kontra dengan kebijakan pemerintah. Kondisi itu membuat kebebasan di Filipina pun menurun secara signifikan, bersamaan dengan bertambahnya korban di luar daftar tersangka narkoba (Amnesty International 2020).

### **3.3 Menyusun Agenda Kebijakan (Agenda Setting)**

Melalui edukasi publik, serta aktivitas advokasi dan lobi, NGO berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan agenda kebijakan. Penyusunan agenda dapat dilihat dari upaya NGO untuk menempatkan isu tertentu dalam agenda politik sehingga pejabat pembuat kebijakan dapat memberi perhatian lebih pada isu tersebut. Pada isu HAM, hal ini menjadi penting karena umumnya pemerintah cenderung mengabaikan isu-isu terkait hak perempuan dan hak individu, sehingga sebagian besar isu HAM yang menjadi agenda politik dimulai dari agenda NGO (Ahmed and Potter 2006, 49).

Pada penelitian ini, penyusunan agenda kebijakan dilakukan oleh Amnesty International dengan melalui seruan secara langsung kepada pemerintah Filipina, didukung oleh seruan terhadap aktor-aktor transnasional lainnya. Di samping itu, Amnesty International juga menyebarkan informasi terkait situasi yang sebenarnya terjadi di Filipina sehingga publik dapat lebih memahami tingkat pelanggaran yang telah terjadi di negara tersebut. Dengan demikian, diharapkan opini publik terkait isu tersebut dapat berpengaruh terhadap bagaimana Duterte menyikapi kebijakan *war on drugs* selanjutnya. **Penyebaran informasi dilakukan melalui beberapa cara, seperti mempublikasikan artikel ataupun laporan terkait situasi di Filipina melalui situs resmi Amnesty International. Misalnya, Amnesty International**

mempublikasikan laporan berjudul *'They Just Kill'* pada 2019 yang berisi tentang detail jumlah korban dalam pembunuhan tanpa proses hukum yang dilakukan oleh Duterte (Amnesty International Australia 2019). Amnesty International juga mengunggah artikel-artikel daring secara berkala, baik menjelaskan tentang situasi nyata di Filipina, hasil jumpa pers dari staf Amnesty International sendiri, dan seruan terhadap aktor-aktor lain untuk lebih berkontribusi dalam penyelesaian masalah ini.

Amnesty International juga mengeluarkan seruan atau kecaman terhadap aktor-aktor yang seharusnya bekerja sama dalam mencapai penegakan HAM di Filipina, khususnya pemerintah Filipina. Banyak perwakilan Amnesty International yang menyerukan kritiknya terhadap pemerintah Filipina yang dinilai tidak kooperatif dalam proses investigasi pelanggaran HAM. Amnesty International juga mengeluarkan kritik kepada organisasi internasional, seperti UNHRC dan ICC, untuk segera menginvestigasi kasus pembunuhan tanpa proses hukum yang terjadi di Filipina. Adanya perhatian yang lebih besar terhadap pihak-pihak tersebut, melalui informasi yang diberikan oleh Amnesty International, diperkirakan akan memberi tekanan khusus agar mereka terlibat dalam penyelesaian masalah di Filipina.

Dengan publikasi informasi tersebut, ditambah adanya perhatian terhadap aktor-aktor lain, diharapkan isu pelanggaran HAM dapat menjadi agenda penting bagi masyarakat ataupun aktor politik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Filipina akibat kebijakan *war on drugs*. Penyusunan agenda ini diperlukan agar isu

HAM menjadi salah satu bagian penting dalam politik, sehingga pelanggaran terhadap HAM dapat ditangani secara lebih serius.

### **3.4 Mengawasi Aktor Transnasional Lainnya**

NGO terlibat dalam berbagai aktivitas kerja sama untuk memastikan bahwa negara mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum nasional ataupun hukum internasional. Lebih lanjut, NGO juga berperan dalam mengawasi aktivitas organisasi internasional dan perusahaan multinasional. Dalam aktivitasnya, NGO kemudian bekerja sama dengan aktor transnasional lainnya untuk membentuk jaringan advokasi sehingga pengaruh yang mereka miliki dapat lebih besar (Ahmed and Potter 2006, 51).

Dalam upaya mengawasi aktor transnasional lainnya, Amnesty International melakukan lobi dengan badan-badan lain, seperti PBB dan ICC. Selain lobi, Amnesty International juga mengunggah informasi terkait sikap yang diambil badan-badan tersebut sehingga dapat mempengaruhi opini publik terhadap efektivitas badan itu sendiri. Dengan demikian, aktor transnasional pun dapat mengambil keputusan yang mendukung kepentingan Amnesty Internasional, sembari menghindari opini negatif dari publik.

## **BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kebijakan *war on drugs* yang diimplementasikan oleh Presiden Duterte di Filipina memicu reaksi negatif dari masyarakat internasional karena pelaksanaannya yang dinilai melanggar HAM, terlebih dengan penerapan pembunuhan tanpa proses hukum kepada individu yang diduga terlibat dalam tindak kriminal terkait narkoba. Kondisi itu mendorong berbagai pihak untuk melakukan intervensi sebagai upaya menghentikan pelanggaran HAM di Filipina, salah satunya adalah Amnesty International. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amnesty International melakukan peran politik yaitu aktivitas advokasi dan lobi, meningkatkan kesadaran dengan edukasi dan menyusun agenda setting. Advokasi dan lobi guna menjembatani masyarakat dan pemerintah Filipina. Meningkatkan kesadaran dengan edukasi guna mencapai implikasi politik dengan cara publisitas. Agenda Setting bertujuan untuk menempatkan isu tertentu dalam agenda politik sehingga pejabat pembuat kebijakan dapat memberi perhatian lebih pada isu tersebut.

Dalam praktiknya, aktivitas advokasi dan lobi terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, yakni politik informasi yang dilakukan dengan menyebarkan informasi terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina sebagai dampak dari kebijakan *war on drugs*, baik melalui publikasi laporan ataupun artikel di situs resmi Amnesty International. Kedua, yakni politik pengaruh yang dilakukan dengan mengeluarkan teguran atau tuntutan kepada organisasi internasional, seperti PBB dan ICC, untuk lebih aktif dalam menangani masalah HAM di Filipina. Ketiga, yakni politik

akuntabilitas yang dilakukan dengan mengecam tindakan pemerintah Filipina dan menuntut pemerintah untuk menaati norma dan nilai yang dijunjung oleh Filipina sejak lama.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, peneliti mengajukan beberapa saran. Penelitian ini didasari pada kebijakan Rodrigo Duterte dengan linimasa 2019 - 2022 sehingga perlunya penelitian lebih lanjut terkait efektivitas NGO pada masa pemerintahan berjalan saat ini yaitu pada tahun 2023. Dikarenakan penelitian ini terbatas pada peranan *Amnesty International* (NGO) dalam kurun 2019-2022 pemerintah Rodrigo Duterte, perlu adanya penelitian kembali terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan berjalan Bongbong Marcos pada tahun 2023 untuk melihat apakah terdapat dinamika kebijakan diantara kedua kepemimpinan tersebut. Sehingga, pada penelitian selanjutnya dapat menelaah terkait kebijakan *war on drugs* Bongbong Macros dan keterlibatan NGO didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Shamima, and David Potter. 2006. *NGOs in International Politics*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Al Jazeera. 2017. *Thousands demand end to killings in Duterte's drug war*. Agustus 21. Accessed Agustus 7, 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2017/8/21/thousands-demand-end-to-killings-in-dutertes-drug-war>.
- Alfaro, Sherwin, and Elizabeth Roberts. 2016. *Philippines: More than 5,900 deaths in 'war on drugs' since July*. Desember 12. Accessed Oktober 15, 2023. <https://edition.cnn.com/2016/12/12/asia/philippines-death-toll-drug-war/>.
- Amnesty International. 2002. *Amnesty International Handbook*. Accessed November 8, 2023. <https://www.amnesty.org/en/documents/org20/001/2002/en/>.
- Amnesty International Australia. 2019. *Philippines: Duterte's 'Large-Scale Murdering Enterprise' Amounts to Crimes Against Humanity*. Juli 8. Accessed November 12, 2023. <https://www.amnesty.org.au/philippines-dutertes-large-scale-murdering-enterprise-amounts-to-crimes-against-humanity/>.
- Amnesty International. 2020. *Duterte's legacy of death*. Juli 27. Accessed November 12, 2023. <https://www.amnesty.org.ph/2020/07/dutertes-legacy-of-death/>.
- Amnesty International Filipina. 2021. *Widespread killings, rampant impunity show real state of nation*. Juli 26. Accessed November 12, 2023. <https://www.amnesty.org.ph/2021/07/widespread-killings-rampant-impunity-show-real-state-of-nation/>.
- Amnesty International. 2020. *My Job Is To Kill*. London: Amnesty International. <https://www.amnesty.org.ph/wp-content/uploads/2020/09/MyJobIstoKill-ASA3530852020ENGLISH.pdf>.
- Amnesty International Philippines. n.d. *Who We Are*. Accessed November 8, 2023. <https://www.amnesty.org.ph/who-we-are/>.
- Amnesty International. 2021. *Philippines: Duterte cannot halt ICC investigation into murderous "war on drugs"*. Juli 23. Accessed November 11, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/duterte-cannot-halt-investigation-into-war-on-drugs/>.
- . 2020. *Philippines: Free senator and end attacks on human rights defenders*. Februari 20. Accessed November 12, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/philippines-free-senator-and-end-attacks-on-human-rights-defenders/>.



- . 2021. *Philippines: ICC launches probe into deadly "war on drugs", seeks to end impunity*. September 16. Accessed November 11, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/icc-launches-probe-philippines-war-on-drugs-duterte/>.
- Amnesty International. 2022. *Philippines: Incitement and Impunity*. London: Amnesty International. <https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/2022/04/ASA3554562022ENGLISH.pdf>.
- Amnesty International. 2020. *Philippines: Jail Releases a Matter of Life and Death*. Public Statement, London: Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3521922020ENGLISH.pdf>.
- . 2019. *Philippines: President's call to revive death penalty will only worsen climate of impunity*. Juli 22. Accessed November 12, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/07/philippines-president-call-revive-death-penalty-only-worsen-climate-of-impunity/>.
- . 2019. *Philippines: UN investigation urgently needed into Duterte administration's murderous "war on drugs"*. Juli 8. Accessed November 9, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/07/philippines-un-investigation-urgently-needed-duterte-war-drugs/>.
- . 2020. *Philippines: UN must intensify pressure to end killings as impunity reigns*. September 25. Accessed November 10, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/09/philippines-un-pressure-end-killings/>.
- . 2020. *Philippines: UN resolution a missed chance for justice put scrutiny continues*. Oktober 7. Accessed November 11, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/10/philippines-un-resolution-a-missed-chance-for-justice-but-scrutiny-continues/>.
- . 2019. *Statute of Amnesty International: As amended by the 2019 Global Assembly Meeting in Johannesburg, South Africa, 2-4 August 2019*. September 1. Accessed November 8, 2023. <https://www.amnesty.org/en/documents/pol20/1045/2019/en/>.
- Amnesty International Thailand. 2020. *Philippines: Major TV network threatened by authorities must be allowed to air*. Mei 7. Accessed November 12, 2023. <https://www.amnesty.or.th/en/latest/news/791/>.
- Amnesty International. 2019. *'They Just Kill'*. London: Amnesty International. <https://www.amnesty.org.ph/wp-content/uploads/2019/07/They-Just-Kill-FullReportLoRes.pdf>.
- Amnesty International USA. 2020. *Amnesty International letter to House Re: Arms Sales to Philippines (August 25, 2020)*. Agustus 25. Accessed November 10, 2023. <https://www.amnestyusa.org/updates/amnesty-letter-house-arms-philippines/>.

- Amnesty International. n.d. *Who We Are*. Accessed November 8, 2023. <https://www.amnesty.org/en/about-us/>.
- BBC. 2019. *Philippines drugs war: UN votes to investigate killings*. Juli 11. Accessed Oktober 19, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-asia-48955153>.
- Berlinger, Joshua. 2019. *Philippines: UN decision to probe drug war 'straight from the mouth of the Queen in Alice in Wonderland'*. Juli 12. Accessed November 10, 2023. <https://edition.cnn.com/2019/07/11/asia/philippines-drug-war-un-intl-hnk/index.html>.
- Buan, Lian. 2019. *Drug war documents submitted to Supreme Court 'rubbish'*. September 23. Accessed Oktober 17, 2023. <https://www.rappler.com/nation/240840-centerlaw-says-drug-war-documents-submitted-supreme-court-rubbish/>.
- Cabico, Gaea Katreena. 2019. *Amnesty International urges Filipinos to elect candidates who champion human rights*. April 9. Accessed November 11, 2023. <https://www.philstar.com/headlines/2019/04/09/1908591/amnesty-international-urges-filipinos-elect-candidates-who-champion-human-rights>.
- Carcamo, Dennis. 2015. *PDEA: 92% of Metro Manila barangays drug-affected*. Februari 19. Accessed Oktober 19, 2023. <https://www.philstar.com/nation/2015/02/19/1425462/pdea-92-metro-manila-barangays-drug-affected>.
- Chandran, Nyshka. 2017. *The Philippines' strongman president is losing popularity as citizens tire of drug war*. Oktober 10. Accessed Oktober 15, 2023. <https://www.cnn.com/2017/10/10/philippines-drug-war-hits-president-rodrigo-duterte-popularity-ratings.html>.
- Conde, Carlos H. 2018. *Philippine Police Promotions an Affront to 'Drug War' Victims*. Juni 7. Accessed Oktober 17, 2023. <https://www.hrw.org/news/2018/06/07/philippine-police-promotions-affront-drug-war-victims>.
- . 2019. *Philippines' Disinformation Campaign in Geneva*. Juli 6. Accessed Oktober 17, 2023. <https://www.hrw.org/news/2019/07/06/philippines-disinformation-campaign-geneva>.
- Ellis-Petersen, Hannah. 2019. *UN launches 'comprehensive' review of Philippine drug war*. Juli 12. Accessed Oktober 19, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2019/jul/12/un-launches-comprehensive-review-of-philippine-drug-war>.
- Esguerra, Darryl John. 2019. *Duterte assures cops: 'You're safe in the Senate' with Go, Bato*. Agustus 8. Accessed Oktober 17, 2023. <https://newsinfo.inquirer.net/1151950/duterte-assures-cops-youre-safe-in-the-senate-with-go-bato>.

- Gavilan, Jodesz. 2016. *Duterte's War on Drugs: The First 6 Months*. December 31. Accessed Agustus 7, 2023. <https://www.rappler.com/newsbreak/podcasts-videos/153510-rodrigo-duterte-war-on-drugs-2016/>.
- Guardian, The. 2016. *Kill drug dealers and I'll give you a medal, says Philippines president*. Juni 5. Accessed Oktober 15, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2016/jun/05/kill-drug-dealers-medal-philippines-president-rodrigo-duterte>.
- Guay, Moises Allaga, and Robinson Dongpopen Cawi. 2021. "The Implementation of War on Drugs Program in One of the Municipalities of Ifugao Province." *Humaniora* 12 (3): 191-200. doi:10.21512/humaniora.v12i3.7116.
- Hincks, Joseph. 2018. *Duterte is Assasinating Opponents Under the Cover of the Drug War, Philippine Rights Group Say*. Juli 5. Accessed Oktober 18, 2023. <https://time.com/5330071/philippines-mayors-political-assassination-duterte/>.
- HRW. 2017. *"License to Kill": Philippine Police Killings in Duterte's "War on Drugs"*. Maret 2. Accessed Oktober 17, 2023. <https://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-kill/philippine-police-killings-dutertes-war-drugs>.
- . 2020. *"Our Happy Family Is Gone": Impact of the "War on Drugs" on Children in the Philippines*. Mei 27. Accessed Oktober 17, 2023. [https://www.hrw.org/report/2020/05/27/our-happy-family-gone/impact-war-drugs-children-philippines#\\_ftn26](https://www.hrw.org/report/2020/05/27/our-happy-family-gone/impact-war-drugs-children-philippines#_ftn26).
- ICC. 2021. *Republic of the Philippines*. Januari. Accessed Oktober 18, 2023. <https://www.icc-cpi.int/philippines>.
- Israel, Dale G. 2019. *Harsher war on drugs shows its face in Cebu*. Maret 9. Accessed Oktober 17, 2023. <https://newsinfo.inquirer.net/1093707/harsher-war-on-drugs-shows-its-face-in-cebu>.
- Kine, Phelim. 2017. *Philippine Drug Board Urges New Focus to Drug Campaign*. Oktober 30. Accessed Oktober 15, 2023. <https://www.hrw.org/news/2017/10/30/philippine-drug-board-urges-new-focus-drug-campaign>.
- Kishi, Roudabeh, Melissa Pavlik, Rico La Vina, and Marian Constantino. 2018. *Duterte's War: Drug-Related Violence in the Philippines*. Oktober 18. Accessed Oktober 18, 2023. <https://acleddata.com/2018/10/18/dutertes-war-drug-related-violence-in-the-philippines/>.
- Lozada, David. 2021. "How Duterte's 'war on drugs' is being significantly opposed within the Philippines." *Melbourne Asia Review*. doi:10.37839/MAR2652-550X7.4.
- . 2016. *Thousands protest across PH vs Duterte's 'worsening human rights record'*. Desember 11. Accessed Oktober 19, 2023. <https://www.rappler.com/moveph/155164-thousands-protest-duterte-worsening-human-rights-record/>.

- Marquez, Consuelo. 2020. *5,856 suspects killed in anti-drug ops since 2016 - PDEA*. September 25. Accessed Oktober 19, 2023. <https://newsinfo.inquirer.net/1340144/5856-suspects-killed-in-anti-drug-ops-since-2016-pdea>.
- Mogato, Manuel, and Martin Petty. 2018. *Philippines' Duterte hit by new ICC complaint over deadly drug war*. Agustus 28. Accessed Oktober 18, 2023. <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-idUSKCN1LD0CS>.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morgan, Max, and Nelson Groom. 2016. *Drug addicts in jail cells and dealers' bodies littering the streets: 60,000 people turn themselves in to authorities in the Philippines after the president tells citizens to 'go ahead and kill' drug users*. Juli 15. Accessed Oktober 15, 2023. <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3691692/Drug-addicts-Philippines-surrender-authorities-president-Rodrigo-Duterte-urges-citizens-ahead-kill-drug-users-dealers.html>.
- Nebehay, Stephanie. 2020. *U.N. to step up rights work in Philippines after drug war killings*. Oktober 7. Accessed November 11, 2023. <https://www.reuters.com/article/us-philippines-rights-idUSKBN26S24K>.
- Patina, Russel. 2019. *'Chilling effect': Groups slam new SEC guidelines for nonprofits*. Februari 9. Accessed Oktober 17, 2023. <https://www.rappler.com/moveph/223001-civil-society-groups-statements-sec-new-guidelines-non-profit-organizations/>.
- Porio, Emma, and Christine S. Crisol. 2004. *Working Children in Drugs in the Philippines: A Participatory Action Research for Child/Family and Community Empowerment*. Jenewa: International Labour Organization.
- Rappler. 2016. *Duterte's war on drugs: The first 6 months*. Desember 15. Accessed Oktober 19, 2023. <https://www.rappler.com/newsbreak/podcasts-videos/153510-rodrigo-duterte-war-on-drugs-2016/>.
- . 2016. *IN NUMBERS: The Philippines' 'war on drugs'*. September 13. Accessed Agustus 7, 2023. <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs/>.
- Ratcliffe, Rebecca. 2020. *Journalist Maria Ressa found guilty of 'cyberlibel' in Philippines*. Juni 15. Accessed Oktober 18, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2020/jun/15/maria-ressa-rappler-editor-found-guilty-of-cyber-libel-charges-in-philippines>.
- . 2020. *Philippines' main channel forced off-air amid coronavirus lockdown*. Mei 5. Accessed Oktober 18, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/philippines-main-channel-abs-cbn-forced-off-air-amid-coronavirus-lockdown>.
- Regencia, Ted. 2019. *UN approves resolution to probe Duterte's 'war on drugs'*. Juli 12. Accessed November 10, 2023.

- <https://www.aljazeera.com/news/2019/7/12/un-approves-resolution-to-probe-dutertes-war-on-drugs>.
- Reuters. 2019. *Filipinos give thumbs up to Duterte's 'excellent' drugs war: poll*. September 23. Accessed Oktober 19, 2023. <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-idUSKBN1W803M>.
- Roth, Kenneth. 2019. *Philippines: Events of 2018*. Accessed Agustus 8, 2023. <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/philippines>.
- Sant, Shannon Van. 2019. *U.N. Human Rights Council To Investigate Abuses In Philippines' Antidrug War*. Juli 11. Accessed November 10, 2023. <https://www.npr.org/2019/07/11/740894175/u-n-human-rights-council-to-investigate-abuses-in-philippines-antidrug-war>.
- Sarlina, Veniati. 2018. "Respon Amnesty International terhadap pemberantasan narkotika dan obat – obatan berbahaya (narkoba) di Filipina pada masa Rodrigo Duterte." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 6 (3): 893-908.
- Simbulan, Nymia, Leonardo Estacia, Carissa Dioquino-Maligaso, Teodoro Herbosa, and Mellissa Withers. 2019. "The Manila Declaration on the Drug Problem in the Philippines." *Annals of Global Health* 85 (1). doi:10.5334/aogh.28.
- Spiro, Peter J. 2013. "Nongovernmental Organizations in International Relations (Theory)." In *Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of Art*, by Jeffrey L. Dunoff and Mark A. Pollack, 223-243. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139107310.012.
- Sullivan, Emily. 2018. *Duterte Pulls Philippines Out Of International Criminal Court*. Maret 14. Accessed Oktober 18, 2023. <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/03/14/593433935/duterte-pulls-philippines-out-of-international-criminal-court>.
- Talabong, Rambo. 2019. *Central Luzon: New killing fields in Duterte's drug war*. Februari 24. Accessed Oktober 17, 2023.
- Talabong, Rambo, Lian Buan, and Jodesz Gavilan. 2019. *Duterte gov't allows 'drug war' deaths to go unsolved*. Januari 14. Accessed Oktober 17, 2023. <https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/220595-duterte-government-drug-war-deaths-unsolved/>.
- UNODC. 2020. *Drug Use and Health Consequences*. Vienna, Austria: UNODC. [https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20\\_Booklet\\_2.pdf](https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_Booklet_2.pdf).
- UNODC. 2012. *World Drug Report*. Vienna, Austria: UNODC. [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR\\_2012\\_web\\_small.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf).
- World Bank. 1989. *Operational Directive 14.70*.
- Worley, Will. 2016. *Philippines president Rodrigo Duterte tells people to 'go ahead and kill' drug addicts*. Juli 3. Accessed Oktober 15, 2023.

<https://www.independent.co.uk/news/world/asia/philippines-president-rodrigo-duterte-tells-people-to-go-ahead-and-kill-drug-addicts-a7116456.html>.

Xu, Michelle. 2016. *Human Rights and Duterte's War on Drugs*. Desember 16. Accessed Agustus 7, 2023. <https://www.cfr.org/interview/human-rights-and-dutertes-war-drugs>.